

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN
PADA PEMELIHARAAN SAPI DI KECAMATAN PLANTUNGAN
KABUPATEN KENDAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S-1)



Disusun Oleh:

Wahyu Nely Gayatri
122311113

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SRARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena rahmat dan pertolongannya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pada Pemeliharaan Sapi Di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal”. Sholawat serta salam penulis sanjungkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan sahabatnya semoga kita bias mendapatkan syafaatnya besok di akhirat kelak. Penulis sadar akan keterbatasan kemampuan yang ada, maka dalam penyelesaian penulisan ucapkan terimakasih yang tak terhingga, kepada:

1. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si. dan Bapak Rustam DKAH., M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
2. Bapak Afif Noor, S.Ag.,SH., M.Hum., selaku ketua Prodi Muamalah dan Bapak Supangat, M.Ag., atas segala bimbingannya
3. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah membekali pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Syaria’ah dan Hukum
6. Untuk kedua orang tua, Bapak Cipto Hadi dan Ibu Tuter Susiani tercinta yang senantiasa memberikan do’a, kasih sayang, semangat, dan telah mengorbankan segalanya demi suksesnya penulis dalam menuntut ilmu.
7. Semua keluarga dan Adik tersayang Bangkit Surya Jati yang selalu memberikan dukungan dan do’a.
8. Sahabat-sahabat, Dodik Setiawan Aji, Ahmad Fauzi, Wiedya Gladieolla Puspa, Evi Nurlaili, Arif Imamul Huda, Devi Amalia Maharani, dan sahabat

MUB 2012 yang telah memberikan keceriaan dan semangat selama kuliah bersama

9. Untuk mas Haryadi yang selalu memberi semangat dan menemani penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman kos Ni'matul Lailiyah, Iin Hardiyanti, Laeksa Agnes Kusumawati, Nurul Khasanah, Lefti Pujiwati yang telah berjuang bersama.
11. Serta semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini.

Terimakasih atas jasa-jasanya selama ini, mudah-mudahan Allah S.W.T. membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. *Amiin.....*

Semarang, 02 Januari 2018

Penulis

Wahyu Nely Gayatri

122311113

MOTTO

(H.R. Bukhari Muslim) خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain”¹

¹<http://gusdayat.com/2011/11/09/sebaik-baik-amal-sebaik-baik-manusia/> 29-01-2018.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin. Dengan izin Allah SWT. melalui berbagai usaha yang maksimal dan do’a restu dari orang-orang yang saya sayangi dan saya cintai akhirnya penyusunan skripsi ini dapat terwujud dengan baik, semoga karya ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua saya Bapak Cipto Hadi dan Ibu Tuter Susiani, adik saya Bangkit Surya Jati, segenap keluarga. Semoga Allah Sang Pencip taalam semesta memberikan anugerah tiada tara atas segala pengorbanan dan jasa yang telah diberikan.

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian (field research) tentang “tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan pada pemeliharaan sapi di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal”. Penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana praktik sistem pengupahan pada pemeliharaan sapi dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sistem pengupahan pada pemeliharaan sapi di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal?

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan yang kemudian di analisis dengan menggunakan pemikiran induktif : mengoreksi data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan umum. Data diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.

Hasil penelitian yang didapatkan peneliti yaitu, pertama: sistem pengupahan pemeliharaan sapi di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal menggunakan sistem *maro anak* (bagi anak sapi) dan *maro bathi* (bagi keuntungan), dan ketika sapi tidak memberi keuntungan pemeliharanya akan mendapatkan uang lelah atau pemberian yang besarnya ditentukan oleh pihak pemilik sapi apakah diberi banyak atau sedikit. Kesepakatan perjanjian akad hanya menggunakan lisan saja tanpa adanya perjanjian tertulis. kedua: ketika pada akhir akad banyak dari pihak pemilik yang tidak memberikan hak-hak yang seharusnya pemelihara dapatkan seperti pada kesepakatan di awal akad. Namun sistem praktik pemeliharaan sapi dengan menggunakan jasa orang lain sampai saat ini masih berjalan.

Dengan demikian hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan pemberian upah pemeliharaan sapi di Kecamatan Plantungan belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam yakni pengupahan yang dilakukan kepada pemelihara sapi yang telah melaksanakan pekerjaannya, pengupahan tersebut tidak sesuai dengan hasil kesepakatan pada awal akad. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada para pemilik sapi agar dalam melakukan pengupahan kepada pekerjanya memperhatikan hak-hak dari pekerja, khususnya kepada pemelihara sapi dan supaya upah yang dibayarkan kepada pemelihara sapi dapat memenuhi kelayakan sehingga kesejahteraan pemelihara dapat terpenuhi dan seharusnya perjanjian dalam awal akad ditegaskan lagi tentang perjanjian kesepakatan sehingga tidak melalui lisan saja melainkan dengan perjanjian tertulis.

Kata kunci: Hukum Islam, pemberian upah pemeliharaan sapi, keadilan

DAFTAR ISI

HalamanJudul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Halaman Deklarasi.....	vi
Halaman Abstrak.....	vii
Halaman Kata Pengantar.....	xiii
Daftar Isi.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II UJRAH

A. Pengertian Ijarah (Upah).....	23
B. Rukun Ijarah dan Syarat Ijarah.....	21
1. Rukun Ijarah.....	24
2. Syarat Ijarah.....	26
C. Dasar Hukum Ijarah (Upah).....	28
1. Al-Qur'an.....	28
2. Hadits.....	31
D. Sistem Pengupahan.....	32
E. Prinsip-Prinsip Pengupahan.....	33
F. Akad Mudharabah	38

BAB III SISTEM PRAKTIK PENGUPAHAN

- A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Plantungan 46
- B. Sistem Praktik Pengupahan Pada Pemeliharaan Sapi di Kecamatan Plantungan..... 52

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN PADA PEMELIHARAAN SAPI DI KECAMATAN PLANTUNGAN

- A. Analisis Praktik Sistem Pengupahan Pemeliharaan Sapi di Kecamatan Plantungan 68
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pemeliharaan Sapi di Kecamatan Plantungan 71

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 80
- B. Saran-Saran81
- C. Penutup 81

DAFTAR PUSTAKA

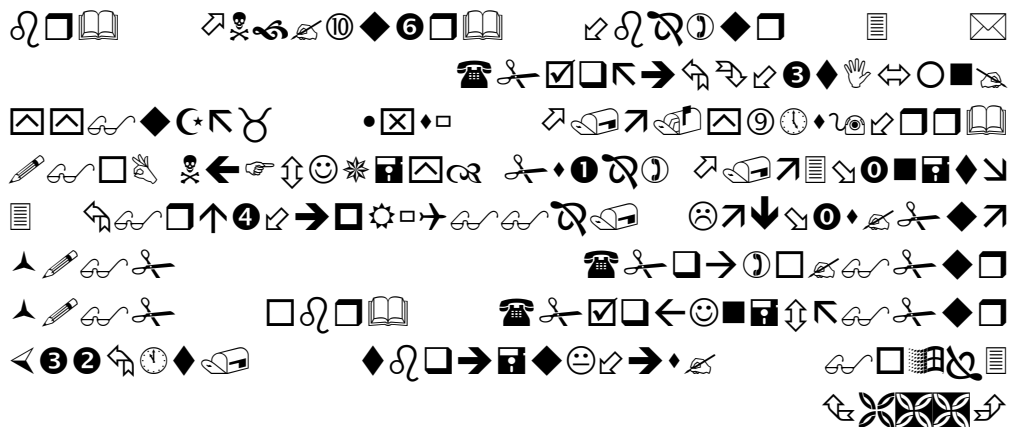
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk mu'amalah adalah akad *Ijarah al-A'mal*, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.¹ Kebolehan transaksi sewa-menyewa didasarkan pada firman Allah:



Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”
(Q.S Al Baqarah : 233)²

Ijarah merupakan suatu bentuk kegiatan kontrak kerja dalam kegiatan bermu'amalah, yaitu dilakukan dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan kerja dengan ganti upah sebagai kompensasinya.³ Dalam

¹ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: MAktabah Tijariyah Kubra, t.t.), III: 1996

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015), hlm. 37

³ Nasrun Haroen, *Fiih Muamalat*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) hlm. 228

praktiknya selalu berkaitan dengan suatu manfaat yang dituju, tertentu dan jelas pekerjaannya, bersifat mubah, jelas waktunya dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu, baik cara mendahulukan upahnya maupun dengan mengakhirkannya.

Ijarah memiliki arti sama dengan upah atau sewa. Ijarah dengan objek jasa yaitu ijarah yang menggunakan jasa sebagai objek ijarah atau mengambil manfaat dari tenaga seseorang. Pendapatan yang diterima dari transaksi ijarah disebut *ujrah*. Al-*ujrah* ialah imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pengguna manfaat sebagai imbalan atas manfaat yang diterimnya. *Ijarah 'amal* digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *mu'jir* dan pekerja tersebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada *ajir* disebut *ujrah*. Dalam bahasa Inggris dari *ujrah* adalah *fee*.⁴

Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah juga merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya.⁵ Dengan jenis pekerjaan yang bersifat pasti, maka upahnya pun harus pasti dan sesuai dengan standar

⁴Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 155.

⁵Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Repormasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

kelayakan, atau setidaknya ada perjanjian yang mengikat kedua belak pihak, baik dari segi pemberi kerja maupun pihak yang menerima pekerjaannya.⁶

Praktik upah mengupah itu seperti halnya pada kegiatan pemeliharaan hewan ternak di daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal. Masyarakat di Kecamatan Plantungan yang sering memanfaatkan jasa seseorang dalam suatu pekerjaan, dimana pihak pertama meminta bantuan kepada pihak kedua untuk melakukan pekerjaan. Masyarakat sering melakukan akad ijarah dalam suatu kegiatan pertanian, peternakan dan yang lainnya. Dalam masyarakat di Kecamatan Plantungan terdapat suatu transaksi akad *ijarah* yaitu pemeliharaan sapi. Biasanya masyarakat setempat melakukan pemeliharaan sapi tersebut masih dalam lingkup keluarga terdekat dan tetangga setempat, pada umumnya mereka saling mengenal satu sama lain dan prosesnya tidak terlalu sulit, karena tidak membutuhkan syarat-syarat administratif. Ketika terjadi perselisihan, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti perjanjian yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

Pemeliharaan sapi dalam masyarakat Plantungan mayoritas melaksanakan kerjasama tersebut dengan cara *maro bathi* dan *maro anak*. Sistem *maro bathi* yaitu dari hasil penjualan sapi dimana hasil dibagi dua yaitu pemilik 60% dan pemelihara 40%. Sedangkan *maro anak* biasanya pemeliharaan sapi yang dibagikan adalah hasil dari perkembangbiakan sapi

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Moh. Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1995) Jilid 13, hlm. 173

yaitu anak sapi (*pedet*).⁷ Bentuk akad yang dilakukan oleh kedua pihakanya melalui lisan saja, dan hal itu sudah menjadi adat kebiasaan yang turun temurun.

Hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan, khususnya dalam kegiatan pemeliharaan ternak sapi di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal ternyata ditemukan masalah, karena adanya ketidak sesuaian upah antara akad yang telah disepakati diawal dan pada akhir akad. Kegiatan upah mengupah pemeliharaan sapi ini sering kali menimbulkan perselisihan antara pemilik sapi dan pemelihara sapi baik dari bentuk upah maupun besarnya upah yang telah disepakati diawal.

Seperti, Bapak Supandi yang sudah bekerja kurang lebih selama 3 tahun kepada Bapak Slamet, yang pada awal kesepakatan upah yang diberikan Bapak Slamet kepada Bapak Supandi yaitu anak sapi yang pertama. Dalam 3 tahun tersebut sapi sudah menghasilkan 2 ekor anak, namun anak sapi / *pedet* yang pertama diminta oleh pemilik (Bapak Slamet) yang kemudian dijual dengan alasan kebutuhan biaya, dan setelah sapi itu menghasilkan anak yang kedua ternyata diminta lagi oleh bapak Slamet dengan alasan yang sama, dan disini Bapak Slamet memberikan uang kepada Bapak Supandi sebagai upah dari hasil penjualan anak sapi yang telah dibagi dua, upah yang diberikan Bapak Slamet kepada Bapak Supandi hanya sebesar Rp. 3.500.000.⁸ Dari pengupahan tersebut yang pada kesepakatan awal

⁷ Bapak Samsi, Warga Desa Bendosari, 13 April 2017

⁸ Wawancara dengan Bapak Supandi (Warga Desa Mojoagung) pada tanggal 13 April 2017

menggunakan sistem *maro anak* namun pada akhir pelaksanaan pengupahan menggunakan sistem *maro bathi* yang sebelumnya tanpa ada musyawarah terlebih dahulu kepada bapak Supandi sebagai pemelihara.

Begitu juga dengan Bapak Sariyan yang telah mempekerjakan bapak Kadirdengan kesepakatan upah yaitu menggunakan sistem *maro bathi* yakni hasil dari penjualan anak sapi/*pedet* dibagi dua dengan pembagian pemilik 60% dan pemelihara 40%, namunketika di akhir akad bapak kadir hanya menerima upah sebesar Rp. 5.000.0000 saja. Sedangkan hasil penjualan anak sapi yaitu 13.700.000.⁹ Dengan pembagian hasil penjualan anak sapi tersebut dan upah yang diterima bapak Kadir tidak memenuhi dari perhitungan 40% nya.

Melihat hal tersebut terdapat adanya salahsatu pihak yang dirugikan dimana sipemelihara mendapatkan upah yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, disisi lain pemelihara juga merasa dirugikan karena telah mengeluarkan banyak biaya dan tenaga dalam perawatan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hal tersebut, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pemeliharaan Sapi di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas. Adapun rumusan masalah adalah:

⁹ Wawancara dengan Bapak Sariyan (Warga Desa Bendosari) pada tanggal 13 April 2017

1. Bagaimana praktik sistem pengupahan pada pemeliharaan sapi yang dilakukan di Kecamatan Plantungan?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap praktik sistem pengupahan pada pemeliharaan sapi di Kecamatan Plantungan?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan dari peneliti adalah:
 - a. Untuk mendiskripsikan praktik ijarah pemeliharaan sapi yang dilakukan di Kecamatan Plantungan
 - b. Untuk mendiskripsikan praktik ijarah pemeliharaan sapi di Kecamatan Plantungan ditinjau dari hukum Islam
2. Manfaat penelitian
 - a. Sebagai sumbangsih terhadap khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum Islam (*Mu'amalah*).
 - b. Kajian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat umum dalam rangka pemenuhan terhadap hak dan kewajiban dalam upah buruh pemeliharaan sapi yang sekarang masih dirasa minim.
 - c. Untuk memenuhi syarat dari Universitas bagi penulis untuk mendapatkan gelar S1.

D. Telaah Pustaka

Beberapa kajian dan pembahasan dalam bentuk karya ilmiah mengenai pemeliharaan sapi dengan sistem ijarah atau pengupahan kiranya sudah bukan hal yang baru lagi. Beberapa karya ilmiah yang berkaitan

dengan tema ijarah atau pengupahan sebagai bahan perbandingan dengan skripsi penulis antara lain, yaitu:

Karya Siti Nurhanik: “*Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Dari Hukum Islam*”. Mengkaji sistem pengupahan masih menggunakan kesepakatan adat atau asas tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat adanya kerelaan dan keikhlasan kedua belah pihak disetiap perjanjian tanpa adanya unsur pemaksaan atau mendholimi, dengan pertimbangan manfaat yang ditimbulkan lebih besar dibanding mudaratnya. Sistem pengupahan sudah berkeadilan gender karena sudah disesuaikan dengan pekerjaannya yang dilakukan buruh baik buruh laki-laki ataupun buruh perempuan yang sudah menjadi ketentuan adat dan tradisi masyarakat tersebut.¹⁰

Karya Mirnawati: “*Analisis Upah Buruh Tani Padi di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*”. Dia menyebutkan bahawa dalam sistem pengupahan buruh tani padi di Desa Pulau Bayur menggunakan sistem upah harian. Dalam pengupahan ini para buruh bekerja dari pagi sampaisore dengan upah yang merekadapatkan sebesar Rp. 50.000 per hari, tetapi kenyataannya upah yang diterima buruh tidak seperti yang telah dijanjikan diawal akad, melainkan upah yang mereka terima yaitu berupa kilogram beras. Menurut pandangan ekonomi islam, sistem upah yang berlaku pada buruh tani padi di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi ini belum sesuai

¹⁰Siti Nurhanik, *Sistem Pengupahan Buruh Tani Di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008)

dengan prinsip ekonomi islam. Sistem upah yang belum sesuai dengan prinsip syariah yaitu mereka belum membayar upah dengan tepat waktu dan upah yang diberikan kepada para buruh tani padi tidak seperti yang telah dijanjikan diawal akad oleh pemiik sawah. Sehingga upah yang diterima oleh buruh tani padi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan adanya kerjasama ini dapat terlaksana dengan baik serta memberikan manfaat antara kedua belah pihak.¹¹

Karya H. Ahmad Nur Shodik: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Di Desa Rejosari Kota Banjar Kabupaten Jawa Barat*. Dia mengkaji Pelaksanaan pengupahan buruh tani yang terjadi di Desa Rejasari kecamatan Langensari kota Banjar merupakan pengupahan sebagaimana biasanya, akan tetapi dalam rangka pembayaran upahnya dengan cara ditangguhkan sampai masa panen tiba, dengan cara mendapatkan kesempatan untuk ikut *gacong*/memetik hasil panen yang kemudian diberikan imbalan upah kerjanya sesuai dengan masa kerja yang telah dilakukan sebelumnya. Pemberian upah seperti ini menurut hukum Islam diperbolehkan karena didalamnya terdapat akad yang jelas dan pasti dari kedua belah pihak dan memang sudah menjadi *Adat* atau *Urf* bagi masyarakat setempat yang sering dilakukan.¹²

¹¹Mirnowati, *Analisis Buruh Tani Padi Di Desa Pulau Bayur Kecamatan Centini Kabupaten Singingi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015)

¹² Ahmad Nur Shodik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Di Desa Rejosari Kota Banjar Kabupaten Jawa Barat*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008)

Karya Fahmi Vidi Alamsyah: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga*”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Upah (*ujrah*) merupakan kompensasi yang diberikan dari Perusahaan PT Royal Korindah kepada tenaga kerja dengan menerapkan sistem upah menurut borongan dan menurut waktu. Penulis merasa tertarik melakukan penelitian terhadap sistem upah tenaga kerja menurut waktu pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga jumlah tenaga kerja tujuh ratus empat puluh delapan tenaga kerja (748) yang begitu banyak dengan besaran upah Rp 52.500,-/ hari. Upah yang diterima oleh tenaga kerja PT Royal Korindah dalam waktu kerja 21 hari setiap tenaga kerja mendapatkan upah Rp 1.102.500,-/ bulan melebihi ambang batas ketetapan upah minimum provinsi Jawa Tengah. Akad *ijarah* yang diterapkan sudah sesuai dengan upah minimum kabupaten dibolehkan menurut ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah dalam akad *ijarah* dan tidak ada paksaan dalam melakukan akad *ijarah*. Besaran upah tenaga kerja PT Royal Korindah dalam konteks *maqashid syariah* memberikan perlindungan atas hak asasi manusia *adh-dharurat al-khamsa* (limahal inti) kepada tenaga kerja, salah satunya telah menerapkan hak asasi manusia dengan melindungi hak harta benda yang harus dimilikinya.¹³

¹³ Fahmi Vidi Alamsyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015)

Karya Bayu Aji Santoso:”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penggajian Di G’bol Coffee Café Yogyakarta*”. Menurut peneliti pelaksanaan sistem penggajian di Cafe G’bol Coffee kurang lebih sama dengan sistem-sistem penggajian diperusahaan-perusahaan swasta lainnya, yaitu dengan bentuk upah berupa cash, tunjangan makan, minum, dan tempat tinggal. Namun ada sedikit permasalahan yang penyusun lihat cukup menarik untuk dikaji ulang, seperti dalam hal jumlah insentif terjadi ketidakadilan antara karyawan, dimana ada sebagian karyawan yang tidak mendapatkan salah satu atau beberapa fasilitas yang diberikan manajemen sebagai insentif. Kemudian dalam durasi jam kerja juga terlihat kurangimbang, yaitu dimana jam kerja malam lebih banyak daripada jam pagi, dan setelah dilakukannya survey, volume kerjalah yang menjadi sebab perbedaan durasi jamkerja ini. Setelah dilakukannya penelitian dan analisis, sistem penggajian di G’bol Coffee Cafe kurang sesuai dengan nilai hukum islam yaitu mengenai penerapan prinsip-prinsip keadilan yang masih kurang tepat terkait dengan perbedaan fasilitas yang diperoleh oleh karyawan yang mendapat tempat tinggal. Dimana terdapat sebagian karyawan yang berlatar belakang sebagai mahasiswa dan punya kos-kosan sendiri, dan tidak mendapatkan fasilitas tempat tinggal tersebut, terjadi ketimpangan dengan karyawan yang berdomisili diwarung. Dan apabila perbedaan fasilitas ini dinominalkan, maka akan terjadi ketidakadilan dalam jumlah yang diterima oleh karyawan. Dalam hal waktu kerja

terdapat perbedaan antara *shift* pagi dan *shift* malam, dimana *shift* malam durasinya lebih lama dari *shift* pagi.¹⁴

Penelitian Rifatul Munawarah Nim: 052311104 dengan judul PERUM DAMRI Unit Angkutan Bus Kota (UABK) Semarang. Dalam penetapan gaji di Perum DAMRI Semarang didasarkan atas peraturan yang diberlakukan oleh Surat Keputusan Direksi dengan menyesuaikan kemampuan perusahaan dan diberikan kepada para karyawan sesuai dengan masa kerja dan pangkat/golongan. Karyawan PERUM DAMRI Semarang menerima gaji setiap tanggal 25, namun perusahaan sering terlambat dalam memberikan gaji karyawannya. Ada beberapa aspek yang tidak bisa dipublikasikan oleh perusahaan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem upah di Perum DAMRI Unit Angkutan Bus Kota (UABK) Semarang belum sesuai dengan hukum Islam. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yang kemudian dianalisis dari aspek hukum (penelitian ini termasuk penelitian hukum non doctrinal) maka ditemukan hasil dari permasalahan dalam penelitian tersebut. Dari hasil permasalahan tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa gaji yang diberikan oleh Perusahaan Umum DAMRI Semarang belum sesuai dengan hukum positif dan Islam yaitu dalam Islam ada 2 konsep upah yaitu adil dan layak. Adil bermakna 2 hal ; (1) jelas dan transparan, (2) proporsional. Sedangkan Layak bermakna 2 hal; (1), cukup pangan, sandang dan papan, (2), sesuai dengan pasaran. Sedangkan dalam hukum positif seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 88

¹⁴Bayu Aji Santoso, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penggajian Di G'bol Coffee Cafe Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013)

dan 89 UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 tentang Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa upah yang diberikan kepada kaum buruh bertujuan untuk pencapaian hidup layak. Artinya standarisasi upah yang diberikan harus sesuai dengan biaya hidup minimum di wilayah tersebut, dan Keterlambatan pembayaran upah, dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi oleh Nabi saw pada hari kiamat. Karena Islam sangat menghargai waktu dan sangat menghargai tenaga seorang karyawan (buruh). PERUM DAMRI Semarang dalam pembayaran upah, agar sangat diperhatikan. Keterlambatan pembayaran upah, dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi oleh Nabi saw pada hari kiamat. Dalam hal ini, Islam sangat menghargai waktu dan sangat menghargai tenaga seorang karyawan (buruh).¹⁵

Karya artikel Azhar bin Abdul Wahab dengan judul *Perspektif Al-Sunnah Terhadap Pemberian Gaji dan Imbuhan Kepada Guru Dan Penceramah Agama*. Penulis membicarakan tentang bayaran kepada penceramah agama yaitu pemberian dalam bentuk gaji tetap dan juga dalam bentuk tambahan. Hadits-hadits yang menerangkan tentang al-Ujrah mempunyai kesimpulan yang berbeda, sebagian hadits ada yang melarang dan hadits lain ada yang membolehkan. Dengan kesimpulan penulis ada beberapa yang melarang menerima tamabahan karena: 1) situasi murid yang miskin menjadikan beban kepadanya 2) guru-guru yang telah digaji oleh

¹⁵Rifatul Munawarah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pengupahan Karyawan Di Perusahaan Umum Damri Semarang*, Jurnal (Semarang: IAIN Walisongo, 2009)

pihak perusahaan dengan jumlah yang mencukupi kebutuhannya, 3) menyampaikan ilmu agama atau berdakwah dalam menerima tambahan bukanlah sesuatu yang dilarang, tetapi meletakkan soal tambahan sebagai prioritas tertinggi untuk meneruskan usaha dakwah merupakan pertimbangan yang salah. Begitu pun yang mengahruskan menerima tambahan karena: 1) kedudukan agama, hal-hal yang berkaitan dengan agama tidak boleh dianggap remeh dan dipandang sebelah mata, jika bidang lain boleh diberi perhatian dan dititik beratkan maka hal-hal yang berkaitan dengan agama juga mesti diberi penekanan dan peruntukkan biaya yang sepatutnya. 2) keperluan guru, ada guru yang daif, miskin dan tidak berkemampuan. Mereka juga perlu dibantu. Jika tidak ada dorongan dan dukungan mereka terpaksa mencukupi sendiri dan keluarga. 3) penceramah yang bertindak sebagai penganjur penyedia kos, mereka mengurus dan mengelola majlis-majlis ilmu. 4) motifasi kepada guru dan sebagai bantuan sesama muslim. 5) urusan niat merupakan hubungan antara individu dengan Allah.¹⁶

Artikel Ahmad Syakur dengan judul *Standar Pengupahan Dalam Ekonomi Islam (studi kritis atas pemikiran Hizbut Tahrir)*. Menurut hasil dari penulis penetapan tingkat upah minimum tersebut tidak bisa diterapkan kepada semua jenis kontrak pekerja dengan pengusaha. Pemikiran Hizbut Tahrir yang tidak membolehkan standar pengupahan berdasarkan kebutuhan pokok pekerja serta tidak membolehkan kebijakan penetapan upah minimum

¹⁶Azahar bin Abdul Wahab, “ Perspektif Al-Sunnah Terhadap Pemberian Gaji Dan Imbuhan Kepada Guru Dan Penceramah Agama: Suatu Harian Deskriptif” *Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE)* Vol. 3: no. 6 (2017) 108-132

oleh pemerintah, layak diterapkan bagi kontrak pekerja yang sifat pekerjaannya tidak menghabiskan waktu pekerja. Sebagaimana kebijakan penetapan upah minimum harus dibahas secara matang agar tidak menjadi kebijakan yang menzalimi salah satu pihak.¹⁷

Artikel karya Murtadho Ridwan dengan judul *Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam*. Dalam artikel ini membahas mengenai adanya perbedaan mendasar antara konsep upah menurut Kapitalis, Sosialis dan Islam. Dalam Islam, pekerja tidak seperti faktor produksi yang lain sehingga dalam menentukan upah pekerja tidak dapat diperlakukan seperti faktor produksi yang lain yang didasarkan pada hukum permintaan dan penawaran. Standar upah dalam Islam harus memenuhi dua syarat yaitu syarat adil dan layak dimana upah yang diterima seorang pekerja harus dapat mencukupi kebutuhan pokok pekerja dan keluarganya.¹⁸

Berkaitan dengan beberapa skripsi dan artikel tersebut, jelas banyak perbedaan dengan skripsi yang penyusun bahas. Karena penyusun lebih menitik beratkan pada sistem praktik pengupahan pada pemeliharaan sapi yang terjadi di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal yang pengupahannya tidak dilakukan sebagaimana yang telah disepakati di awal akad oleh kedua belah pihak.

¹⁷Ahmad Syukur, "Standar Pengupahan Islam", diakses dari https://issuu.com/jurnaluniversum/docs/rev-universum-vol-9-no-1_januari2015_00/ 09 Januari 2018. 20.34

¹⁸Murtadho Ridwan, "Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam" *Equilibrium*. Volume 1, No.2, Desember 2013. 241 diakses dari (<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/217/pdf/09>) 09 Januari 2018

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian dengan cara langsung terjun kelokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan.¹⁹

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Karena penelitian hukum empiris ini pada dasarnya merupakan perolehan data langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara. Hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal. Karena menurut penulis, di Kecamatan Plantungan masih banyak terdapat masalah seperti yang telah diungkapkan oleh penulis dilatar belakang sebelumnya.

3. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data yang melengkapi dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan sekunder.

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, cet. Ke-13 (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm.

10

²⁰SoerjonoSoekanto, *PengantarPenelitianHukum*, (Jakarta :Univesitas Indonesia, 1984), hlm. 252

a. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang berasal langsung dari subyek sebagai sumber informasi yang diteliti. Dalam hal ini yang dimaksud adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan pemilik dan pemelihara sapi di wilayah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.²¹ Penyusun memperoleh data sekunder melalui tokoh masyarakat atau perangkat desa ataupun pegawai kecamatan agar bisa mengetahui bagaimana mereka melakukan kerjasama tersebut.

Sumber data sekunder penelitian ini adalah bersal dari hasil pengamatan serta wawancara terhadap pemilik sapi dan pemelihara sapi.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat, relevan, valid dan reliable maka penulis mengumpulkan sumber data dengan cara:

- a. Wawancara (*interview*) yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada responden.²² Wawancara ini dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang disusun secara

²¹*Ibid*, hlm. 91

²²Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, edisi revisi (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192

sistematis dan berfokus kepada masalah yang diteliti kepada responden. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pemilik sapi dan pemelihara sapi serta melibatkan beberapa perangkat desa di Kecamatan Plantungan.

- b. Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau orang lain tentang subyek. Jika data yang yang diperoleh untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau bahan pustaka, maka kegiatan pengumpulan data itu disebut sebagai studi dokumen. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain datanya sudah jadi dan disebut data sekunder.²³
- c. Observasi, yang digunakan peneliti adalah *Observasi Non Partisipant* karena penyusun tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku. Observer tidak ambil bagian secara langsung dalam situasi kehidupan yang diobservasi tetapi dapat dikatakan sebagai pengamat.

5. Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, penyusun menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni data-data kualitatif (tidak

²³ James A. Black dan Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009) hlm. 306

berupa angka-angka) dianalisis dengan norma-norma. Hukum Islam. Menggunakan analisis deduktif dan induktif.²⁴

Dalam analisis data terdapat tahapan-tahapan analisis data kualitatif, yaitu:

- a. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.²⁵ Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.
- b. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.²⁶ Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.
- c. Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-

²⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 41

²⁵ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya : UNESA University Press, 2007), hlm. 32

²⁶ *Ibid.* Yatim Riyanto, hlm. 33

data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.²⁷

Analisis ini peneliti gunakan untuk menganalisis sistem pengupahan terhadap pemeliharaan sapi di Kecaatan Plantngan dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan pemeliharaan sapi di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama/isi dan bagian akhir.

Bagian awal berisi halaman judul, motto, persembahan, abstrak, halaman pengesahan, kata pengantar dan daftar isi.

Bagiaan utama atau isi dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I: berisi tentang pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II : Merupakan landasan teori yang membahas tentang tinjauan konsep umum mengenai pengertian dan dasar hukum tentang Akad Ijarah, pengertian dan dasar hukum tentang upah, kedudukan upah dalam *Ijarah*, pembagian *Ijarah*, rukun dan syarat *Ijarah*, pembatalan dan berakhirnya akad

²⁷*Ibid*, hlm. 34

Ijarah serta syarat-syarat pengupahan penetapan upah dan pandangan Undang-undang mengenai upah.

Bab III : berisi data tentang praktik pengupahan pemeliharaan sapi di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal, yang di bagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama adalah gambaran umum wilayah yang berisi tata letak geografis, pemerintahan, demografis (kependudukan), keadaan ekonomi, sosial dan budaya serta pendidikan. Sub bab kedua adalah bagaimana sistem praktik pengupahan sapi di Kecamatan Plantungan.

Bab IV: membahas tentang hasil penelitian yang meliputi: praktik akad *Ijarah* pemeliharaan sapi di Kecamatan Plantungan dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan pemeliharaan sapi di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal

Bab V: merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI IJARAH dan MUDHARABAH

A. Definisi *Ijarah* (Upah)

Kajian hukum Islam (fiqh) membahas masalah upah dan perburuhan dalam satu bagian yang disebut dengan *ijarah*. Idris Ahmad berpendapat bahwa pengertian upah adalah mengambil suatu manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.³² Dalam istilah bahasa arab *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-Iwadu* (ganti). Menurut pengertian syara' *Al-Ajarah* ialah “suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”.³³

Nurimansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.³⁴ *Ijarah* pada garis besarnya memiliki dua makna; pertama, pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari sesuatu benda, seperti pakaian, rumah, motor, dan lain-lain. Kedua, pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh *nafs*, seperti seorang pelayan.³⁵ Jenis yang pertama mengarah kepada sewa-menyewa dan jenis yang kedua lebih tertuju kepada upah-mengupah.

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 114

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Penerjemah; Kamaluddin A. Marzuki, *Fiqh Sunnah 13* (Bandung: Al Maarif, 1987) hlm. 7

³⁴ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) hlm. 68

³⁵ Abdurrohman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969), hlm. 96-97

Ujrah (upah) tidak bisa dipisahkan dari *ijarah* karena *Ujrah* termasuk bagian dari *Ijarah*, sedangkan *ijarah* bersifat umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu yang diambil. *Ujrah* (upah) adalah suatu harta yang diberikan sebagai kompensasi pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta yang dapat dimanfaatkan. Definisi upah menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tercantum pada pasal 1 ayat 30 yang berbunyi:

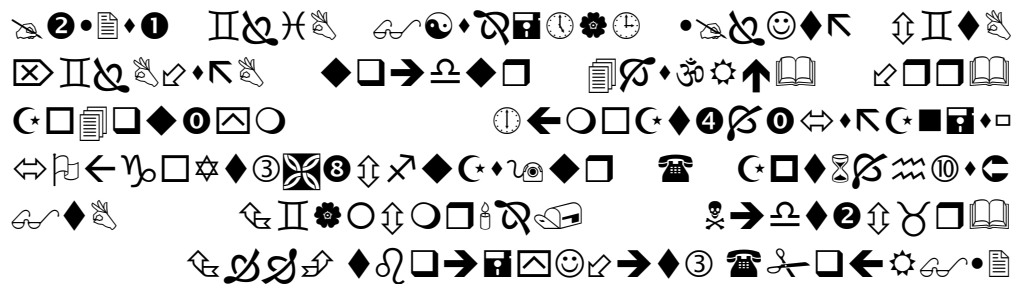
*“Upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”*³⁶

Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah memberikan definisi bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha atau majikan kepada tenaga kerja atau pekerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu perjanjian atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha atau majikan (pemberi kerja) dan pekerja termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun untuk keluarga.³⁷

³⁶ Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, bab 1 ketentuan umum Pasal 1 (30), (Bandung: Nuansa Aulia, 2005), hlm. 13

³⁷ Achmad S Ruky, *Manajemen Penggajian Dan Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan*, cet. Ke-2, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002) hlm.7

Penyebutan upah dalam Al-Qur'an tidak tercantum secara jelas, pemahaman upah hanya dicantumkan dengan pemaknaan yang tersirat, seperti firman Allah Swt surat An-Nahl ayat 97:



Artinya: *“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasn dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan”*³⁸

Quraish Shihab dalam buku Tafsir Al Misbah menjelaskan bahwa didalam Al-Qur'an pada Surat An Nahl 97, maksud dari kata balasan dalam ayat tersebut adalah tentang upah atau kompensasi. Dalam Islam seseorang yang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah maka ia akan mendapatkan balasan baik di dunia (berupa upah) maupun di akhirat (berupa pahala), yang berlipat ganda.³⁹ Upah yang diberikan kepada seseorang seharusnya sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya cukup juga bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015) hlm.278

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 7, (Ciputat: Lentera Hati, 2000) hlm. 339

B. Rukun dan Syarat *Ijarah* (Upah)

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga dapat terwujud karena adanya unsur-unsur yang membentuknya.⁴⁰ Ahli-ahli hukum madzhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah *ijab* dan *qabul*, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya tanpa adanya obyek akad. Perbedaan dengan madzhab Syafi'i hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad.

1. Rukun *Ijarah*

a. *Akid* (orang yang berakad)⁴¹

Yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir* dan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.⁴²

Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu mestinya orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar mumayyiz saja.⁴³

b. *Sighat akad* (ijab qabul)

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sighatul 'aqd*), terdiri dari atas *ijab* dan *qabul*. Dalam hukum perjanjian Islam, *ijab* dan *qabul* dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan

⁴⁰ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm.95

⁴¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) hlm. 125

⁴² Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 117

⁴³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) hlm. 35

atau tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata.⁴⁴ Syarat-syarat sama dengan syarat ijab qabul pada jual beli, hanya saja ijab qabul dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁴⁵

c. *Ujarah* (Upah)

Berdasarkan Penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasul. Secara umum ketentuan Al-Qur'an yang ada kaitannya dengan upah kerja ini dapat dijumpai dalam surat An-Nahl ayat 90:

Artinya: “*sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.⁴⁶

Ujarah (Upah) dapat digolongkan menjadi 2, yaitu:

⁴⁴ Syamsul Anwar, *Op.Cit.*, hlm. 136

⁴⁵ Moh. Saifullah Al Aziz S, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Terang Surabaya, 2005) hlm.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015) hlm.277

- 1) Upah yang telah disebutkan (*ajr al-musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak).
- 2) Upah yang sepadan (*ajr al-mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.⁴⁷

Selain itu upah yang diberikan berupa harta yang secara syar'i bernilai dan upah hendaknya diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.⁴⁸ Pemberian upah atau imbalan dalam *Ujrah* mestinya berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.

d. Manfaat

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaanya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi *Ujrah* yang masih kabur hukumnya adalah fasid (tidak sah).⁴⁹

2. Syarat Ijarah

⁴⁷ Nurur Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) hlm. 230

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 118

⁴⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawandi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) hlm. 84

Mengenai syarat-syarat *Ijarah* (Upah), Taqiyyudin an-Nabhani memberikan kriteria sebagai berikut:

- a. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidak jelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- b. Upah harus dibayarkan segera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- c. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa)
- d. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Sesuai disini adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang.
- e. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya,

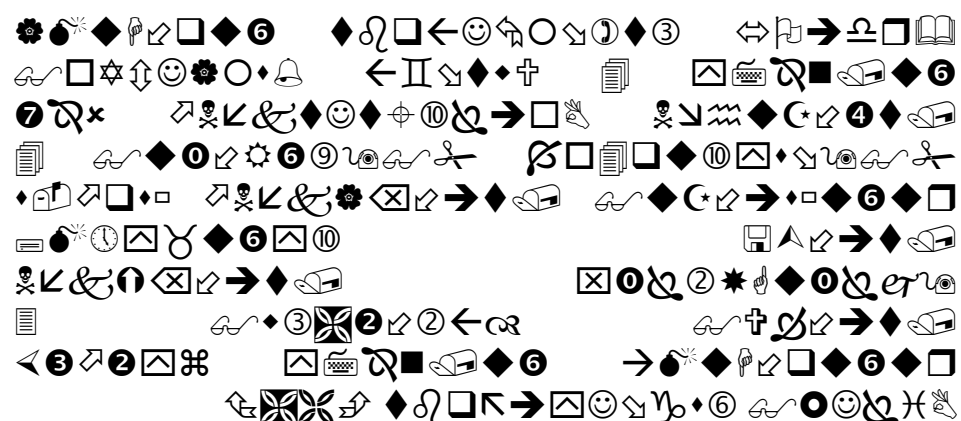
- f. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.⁵⁰

C. Dasar Hukum *Ijarah* (Upah)

Jumhur fukaha bersepakat bahwa hukum upah mubah. Hal ini, didasari karena upah diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Upah merupakan akad yang sangat manusiawi. Karena seseorang dalam kehidupannya tidak mampu dalam memenuhi semua pekerjaan dan keinginannya, kecuali jika ia memberikan upah kepada orang lain untuk membantunya.⁵¹

1. Al- Qur'an

Dasar yang membolehkan upah adalah firman Allah dan Sunnah Rasul-nya. Allah berfirman dalam Surat Az-Zukhruf ayat 32:

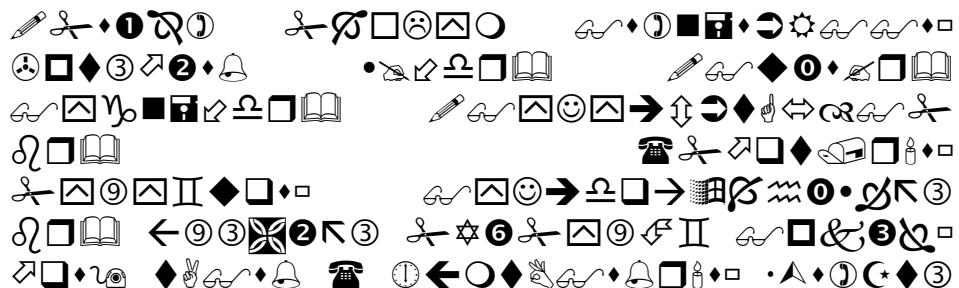


⁵⁰Taqiyyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) hlm. 103

⁵¹Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2010), hlm. 141

Artinya: ”Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”⁵²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa rahmat Allah semata-mata adalah wewenang dari Allah, bukan dari manusia. Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan duniawi, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya, dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.⁵³



⁵²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015) hlm. 491

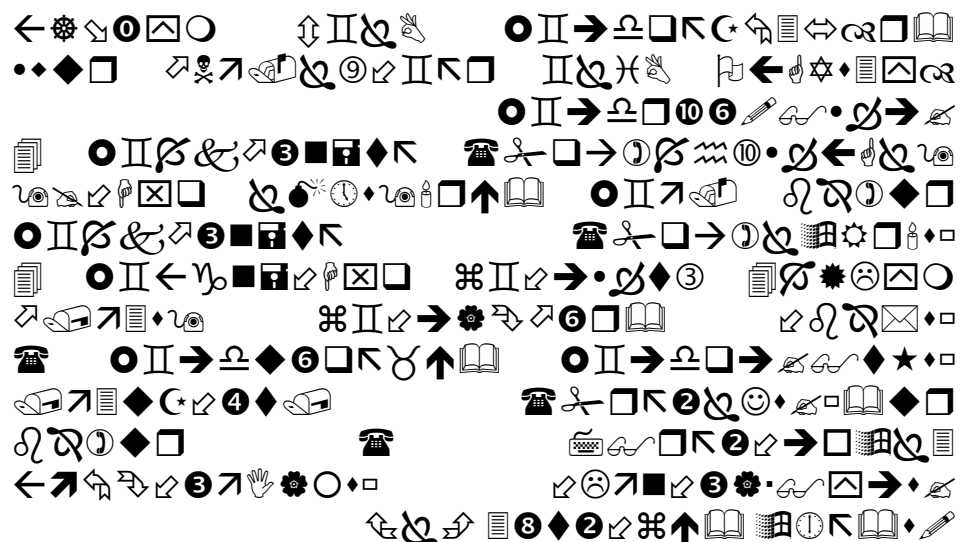
⁵³M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 561



Artinya: “Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".(Q.S Al-Kahfi ayat 77)⁵⁴

Surat Al-Kahfi menceritakan perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir disuatu negeri yang dinding pada sebuah rumah akan roboh, Nabi Musa berkata: “Jika engkau mau memperbaiki dinding tersebut, maka engkau akan mengambil upah atas perbaikan dinding tersebut, sehingga dengan upah itu kita dapat membeli makan”.

Allah berfirman dalam surat Ath-Thalaq ayat 6:



⁵⁴ Deparemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2015) hlm. 301

Artinya: *"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".*⁵⁵

Pada ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada hamba-Nya yang beriman supaya membayar upah menyusui kepada istrinya yang diceraikan. Kemudian dalam al-Qur'an disebutkan bahwa orang yang melakukan pekerjaan, maka ia akan mendapatkan upah.

Nabi Muhammad SAW sendiri, selain banyak memberikan penjelasan tentang anjuran, juga memberikan teladan dalam pemberian imbalan atau upah terhadap jasa yang diberikan seseorang.

2. Hadits

Hadits Nabi antara lain:

hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah:

HR. Ibnu Majah al-Thabrani dan al-Tirmidzi

أَعْطُوا أَلَ جِيرَانَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: *"Berilah upah kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringat mereka".*⁵⁶

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015) hlm. 559

⁵⁶ Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.*, hlm.124

Selain itu dalam hadits juga diriwayatkan bahwasannya upah harus ditentukan terlebih dahulu

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْمَلْ أَجْرُهُ .

Artinya: “Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya.” (HR. Abd Rozaq dari Abu Hurairah)⁵⁷

Pemberian upah atas tukang bekam dibolehkan, sehingga mengupah atas jasa pengobatan pun juga dipebolehkan.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجِمَ وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ

Artinya: ”Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ”Nabi Saw pernah berbekam kemudian memberinya upah.” (H.R. Ibnu Majah)⁵⁸

Dari nash-nash diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian perburuhan dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dibenarkan dalam Islam dengan kata lain selain upah (upah kerja) yang merupakan salah satu macam *Ijarah* dalam hukum Islam itu dapat dibenarkan.⁵⁹

D. Sistem Pengupahan

Dalam pengupahan terdapat dua sistem yaitu:

1. Upah dalam ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah atau ketataatan, seperti dalam sholat, atau puasa, atau menunaikan ibadah haji, atau membaca al-

⁵⁷ Rachmat Syafe'i, *Ibid.*, hlm.124

⁵⁸ Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm.

⁵⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Waqaf, Ijarah, dan Syirkah*, (Bandung: Al Maarif, 1987) hlm. 28

Qur'an, ataupun untuk azan diperselisihkan kebolehan nya oleh para ulama karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini.

Madzhab Syafi'i dan maliki Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan ilmu-ilmu, karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan pengajaran suatu ilmu baik secara bulanan maupun sekaligus karena nash yang melarang tidak ada.⁶⁰

2. Sistem pengupahan pekerjaan yang bersifat materi

Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya pengupahan seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya, yaitu:

- a. Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat keterampilan teknis, contoh pekerjaan berkaitan dengan mekanik perbengkelan, pekerjaan di proyek-proyek yang bersifat fisik, pekerjaan dibidang industry mekanik lainnya.
- b. Kompetensi sosial, yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan, seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, dan lainnya.
- c. Kompetensi menejerial, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti manager keuangan dan lainnya.

⁶⁰ Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.*, hlm. 127

- d. Kompetensi intelektual, yaitu tenaga dibidang perencanaan, konsultan, dosen, guru, dan lainnya.⁶¹

E. Prinsip-Prinsip Pengupahan

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni buruh dan pengusaha. Dalam ini ada beberapa yang harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan yaitu prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.

1. Prinsip Keadilan

Seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Keadilan berarti menurut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang diberikan buruh.

Adil mempunyai bermacam-macam makna, diantaranya sebagai berikut:

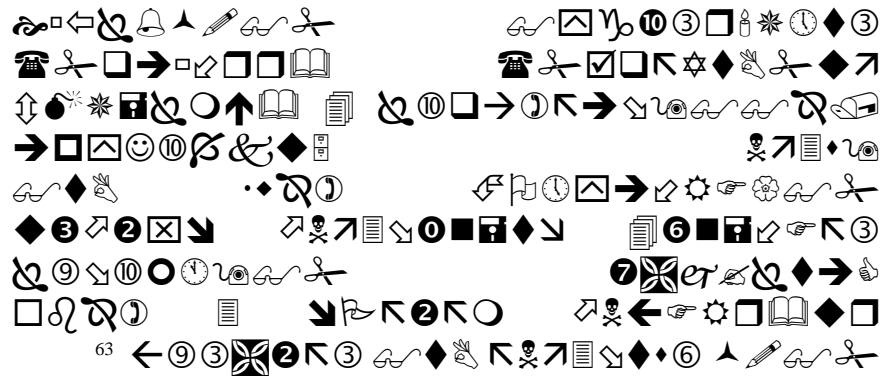
- a. Adil bermakna jelas dan transparan

Sebagaimana firman Allah SWT:



⁶¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009) hlm. 89-93

⁶² Al-baqarah (2):282



Berdasarkan kedua ayat tersebut, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha, dalam hal tersebut sebelum pekerja dikerjakan harus dijelaskan dahulu mengenai jenis pekerjaan, jangka waktu, serta besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja.

Yusuf al-Qaradawi dalam kitabnya, menjelaskan bahwa:

“sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menuaniakan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umah Islam terkait dengan syarat-syarat antar mereka kecali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya halini dijelaskan

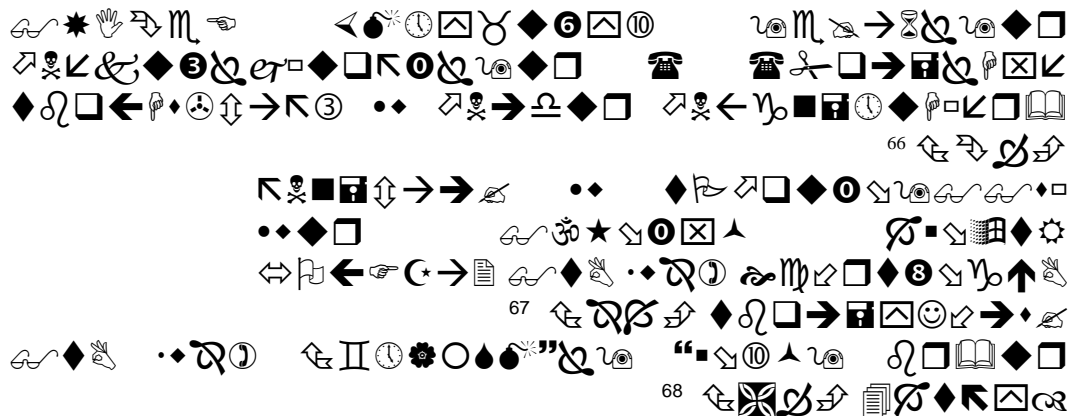
⁶³ Al-Maidah (5): 1

secara detail dalam “peraturan kerja” yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belak pihak”.⁶⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa upah atau gaji merupakan hak pekerja apabila bekerja dengan baik, jika pekerja tersebut tidak benar dalam bekerja dengan tidak bekerja tanpa alasan yang jelas maka gajinya dapat dipotong ata disesuaikan. Selain hak pekerja memperoleh upah atas apa yang diusahakannya, juga hak perusahaan untuk memperoleh hasilkerja dari pekerja dengan baik. Bahkan al-Qardawi mengatakan bahwa bekerja dengan baik merupakan kewajiban pekerja atas hak upah yang diperolehnya. Demikian juga, memberi upah merupakan kewajiban perusahaan atas hak hasil kerja pekerja yang diperolehnya.⁶⁵

b. Adil bermakna proporsional

Prinsip adil secara proporsional ini disebutkan dalam Firman Allah, sebagai berikut:



⁶⁴ Yusuf al-Qardawi, *Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Rabbani Press 1997) hlm. 405

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 406

⁶⁶ Al-Ahqaf (46): 19

⁶⁷ Yasin (36): 54

⁶⁸ An-Najm (53): 39

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu. Upah adalah hak dan bukan pemberian sebagai hadiah.⁶⁹

2. Prinsip Kelayakan

Kelayakan menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak, adapun layak mempunyai makna sebagai berikut:

a. Layak bermakna cukup pangan, sandang, dan papan.

Makna tersebut ditinjau dari Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzarr, yaitu:

Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).” (HR. Muslim).⁷⁰

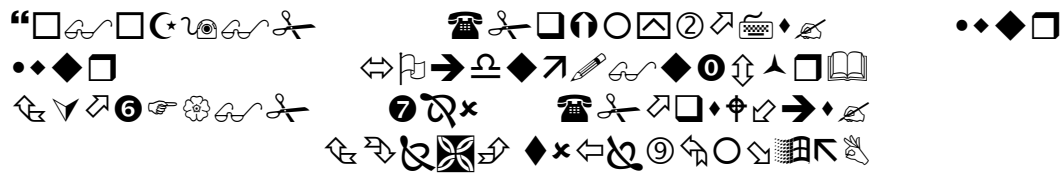
Berdasarkan hadits diatas, bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari 3 aspek yaitu: Pangan (makanan), Sandang (pakaian), dan Papan (tempat tinggal).

b. Layak bermakna sesuai dengan pasaran

Dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

⁶⁹ Eggy Sudjana, *Bayarlah Upahnya Sebelum Kering Keringatnya*, (Jakarta: PPMI, 2000), hlm. 34

⁷⁰ Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'as as-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, jilid III. (Beirut: Fikr, 1981) Hlm. 66



Artinya: ”*dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan*”⁷¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih sederhana, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah memperkerjakan seseorang jauh dibawah upah yang biasanya diberikan.

3. Prinsip Kebajikan

Kebajikan berarti menuntut agar jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan kepada buruh agar dapat diberikan bonus. Dalam perjanjian keda belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya yang merugikan kepentingan pengusaha dan buruh. Penganiayaan terhadap buruh berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja buruh. Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap pengusaha adalah mereka dipaksa buruh untuk membayar upah buruh melebihi dari kemampuan mereka.⁷²

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, Islam memberikan

⁷¹ As-Syuu'araa (26): 183

⁷² Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994) hlm. 195

kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai dengan perjanjian yang disepakati (akad). Mereka bebas bergerak untuk mencari penghidupan di bagian mana saja di dalam negaranya. Tidak ada pembatasan sama sekali terhadap perpindahan mereka dari satu daerah ke daerah lainnya di negara tersebut guna mencari upah yang lebih tinggi.

F. Akad Mudharabah

1. Akad Mudharabah

Secara teknis dan inti mekanisme daripada investasi bagi hasil (*mudharabah*) ini adalah suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Sementara keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituang dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak pertama secara keseluruhan selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian sipengelola atau kecurangan, maka sipengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁷³

Berdasarkan definisi tersebut terdapat dua pihak dalam kontrak *mudharabah*, yaitu pihak *shahibul mal* dan *mudharib*. *Shahibul mal* adalah orang mempunyai surplus dana yang menyediakan dana tersebut untuk kepentingan usaha. Sementara *mudharib* adalah pengelola usaha yang membutuhkan dana dari *shahibul maal*. Menurut Kuran, kedua belah pihak harus memahami betul bagaimana kontrak *mudharabah* dijalankan sehingga ia menegaskan bahwa: Keduanya saling memahami,

⁷³ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 27

artinya *shahibul mal* mengenali *mudharib* dan memahami jenis jenis usaha yang akan dilakukannya, begitu pula *mudharib* mengerti akan kemurahan hati *shahibul mal*. Keduanya terlibat langsung dalam kontrak kerja sama yang saling membutuhkan tersebut dan dilakukannya sendiri secara sadar dan dapat memperkirakan hasil usahanya.⁷⁴

Dari pengertian *mudharabah* diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *mudharabah* adalah suatu ikatan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola modal atau usaha dan atas dasar kesepakatan bahwa apabila terdapat keuntungan maka keuntungan itu dibagi antara pemilik modal dengan pengelola, sedangkan terjadi kerugian maka kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana selama itu bukan atas kelalaian pihak pengelola dana.

2. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

a. Rukun *Mudharabah*

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah Ijab dan Qabul, yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudharabah*, atau kata-kata yang searti dengannya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan shighat (*ijab qabul*).

⁷⁴ *Ibid.*, Hlm. 27-28

Menurut ulama Syafi'iyah rukun *qiradh* ada enam yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya,
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3. *Aqad mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang,
4. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal,
5. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba,
6. Keuntungan,⁷⁵

Menurut Adiwarmanto A.karim, faktor-faktor yang harus ada (*rukun*) dalam akad *mudharabah* adalah:

1. Pelaku (Pemilik Modal maupun pelaksana usaha)

Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau '*amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

2. Objek *Mudharabah* (Modal dan kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, modal yang

⁷⁵ Hendi Suhendi. *Op. Cit.*, Hlm. 139

diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.

3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad *mudharabah*. Sipemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

4. Nisbah keuntungan

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual-beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

b. *Syarat Mudharabah*

1. Modal hendaknya uang legal, sedangkan menggunakan perhiasan, buah-buahan dan barang dagangan lainnya diperselisihkan ulama.
2. Pengolahan tidak boleh dipersulitkan dalam melaksanakan jual-beli, karena menyebabkan tidak tercapainya tujuan mudharabah, kadang-kadang pengusaha memperoleh kesempatan manis untuk memperoleh laba, akan tetapi ditanya-tanya terus oleh pemilik modal, akhirnya usahanya itu gagal dengan demikian gagal pula tujuan mudharabah yang sebenarnya yaitu memperoleh keuntungan.
3. Laba dibagi bersama antara pemilik modal dengan pengusaha, yang satu mendapatkan bagian laba dan jerih payahnya dan yang lain mengambil bagian laba dari modalnya.
4. Pembagian laba hendaknya sudah ditentukan dalam akad.
5. Akad tidak ditentukan berapa lama, karena laba itu tidak bisa diketahui kapan waktunya, seorang pengusaha kadang-kadang belum berlabanya hari ini akan tetapi mungkin akan memperoleh laba berapa hari kemudian.

Adapun syarat-syarat sahnya *mudharabah* berkaitan dengan aqidain (dua orang yang berakad), modal, dan laba adalah :²⁹

1. *Syarat aqidain*

Yakni di syaratkan pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *mudharib*

mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak di syaratkan harus muslim. *Mudharabah* dibolehkan dengan orang kafir dzimmi atau orang kafir yang dilindungi di negara Islam. Sedangkan Malikiyah menambahkan asalkan mereka tidak melakukan riba.

2. *Syarat modal*, yaitu:

- a. Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya yang memungkinkan dalam perkongsian.
- b. Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
- c. Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad.
- d. Modal harus diberikan kepada pengusaha agar digunakan harta tersebut sebagai amanah.

3. *Syarat-syarat laba*, yaitu:

- a. Laba harus memiliki ukuran.
- b. Laba harus berupa bagian yang umum.⁷⁶

Dengan demikian sistem *mudharabah* ini masing-masing pihak mempunyai hak yang ditetapkan bersama, sehingga kemungkinan terjadi pelanggaran amat kecil. Adapun hak-hak tersebut adalah :

1. Hak Pekerja

- a. Seorang pekerja mendapat keuntungan sesuai dengan ketrampilannya.

⁷⁶ Rachmat Syafi'i, *Op. Cit.*, hlm. 298

- b. Modal yang digunakan adalah sebagai amanah yang wajib dijaga, sekiranya terjadi kerugian maka tidak ada ganti rugi dan tuntutan
 - c. Kedudukan pekerja adalah sebagai agen, yang dapat menggunakan modal atas persetujuan pemilik modal. Tetapi tidak berhak membeli dan menjual barang tersebut.
 - d. Apabila ada keuntungan, maka dia berhak mendapatkan imbalan atas usaha dan tenaganya, sekiranya usaha itu rugi, dia berhak mendapatkan upah.
 - e. Apabila pekerja itu tidak bekerja di daerahnya sendiri, seperti di kota yang jauh, maka dia pun berhak mendapatkan uang makan dan sebagainya.
2. Hak Pemilik Modal
- a. Keuntungan dibagi di hadapan hak pemilik modal dan pekerja pada saat pekerja mengambil bagian keuntungan.
 - b. Pekerja tidak boleh mengambil bagiannya tanpa kehadiran pemilik modal.
3. Kontrak Berakhir
- a. Kontrak bisa berakhir atas persetujuan kedua belah pihak.
 - b. Kontrak berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia. Kontrak dapat diteruskan oleh ahli waris dengan kontrak yang baru.⁷⁷

⁷⁷ M. Ali Hasan, *Masail Fiqliyah*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003), Ed. Revisi, cet.4, h. 119-120.

Apabila sistem *mudharabah* ini dapat diterapkan dengan baik di dalam masyarakat di Indonesia ini, maka kecemburuan sosial yang sering mencuat (muncul) dapat diperkecil dan pembangunan ekonomi yang berlandaskan syariah Islamiyah berangsur-angsur dapat diwujudkan.

BAB III

PRAKTIK PENGUPAHAN PEMELIHARAAN SAPI DI

KECAMATAN PLANTUNGAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Plantungan

1. Keadaan Geografis Kecamatan Plantungan

Plantungan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Plantungan merupakan salah satu dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal. Kecamatan Plantungan terletak di wilayah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dan berada di dataran tinggi. Pada ketinggian rata – rata 700 m di atas permukaan laut. Luas wilayah Kecamatan Plantungan mencapai 48,82 Km². Sebagian besar wilayah Kecamatan Plantungan digunakan sebagai lahan perkebunan dan hutan yakni sebesar 25,71 Km² (52,66 %), selebihnya untuk lahan sawah sebesar 12,07 Km² (24,72%), dan lahan bukan pertanian sebesar 11,04 Km² (22,16%).

Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Selatan : Gunung Prahu
- b. Sebelah Utara : Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Sukorejo⁷⁸

⁷⁸ Sumber data: Kecamatan Plantungan

2. Pemerintahan

Kecamatan Plantungan terdiri dari 12 desa, dengan jumlah dusun/dukuh sebanyak 55 dusun. Jumlah Rukun Warga sebanyak 61 RW dan jumlah Rukun tetangga sebanyak 250 RT. Sedangkan jumlah perangkat desa yang ada di Kecamatan Plantungan ssebanyak 120 orang yang terdiri dari 9 Kepala Desa, 9 sekretaris desa, 9 kaur keuangan, 8 kaur pemerintahan, 15 modin, 4 bayan tani, 6 Jagabaya (kepetengan) dan 53 kamituwo (kepala dusun). Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Kendal. Secara atmistrasi Kecamtan Plantungan terbagi dalam 12 desa yang masuk dalam klasifikasi desa swasembada. Kecamatan Plantungan terdiri dari jumlah dusun 55, jumlah RW 61 dengan 250 RT. Jumlah PNS di kantor Kecamakatan Plantungan 22 orang yang terdiri dari 17 PNS laki-laki dan 5 PNS perempuan. Jumlah perangkat desa Kecamatan Plantungan adalah sebagai berikut: Kades 12 orang, Sekdes 12 orang, Kaur/Kasi 49 orang, dan Kadus sejumlah 53 orang

Tabel 1

Banyaknya dusun, Dukuh, Rt dan RW di Kecamatan Plantungan

Desa/Kelurahan	Dusun	(RW)	(RT)
01. Blumah	2	3	8
02. Tlogopayung	8	8	24
03. Kediten	4	4	13
04. Wonodadi	7	7	33

05. Manggungmangu	3	3	21
06. Tirtomulyo	7	7	28
07. Jurang Agung	4	7	29
09.Jati	2	3	12
08.Karanganyar	3	3	16
10. Bendosari	7	7	24
11. Wadas	5	5	26
12. Mojoagung	3	4	16
Jumlah	55	61	250

Sumber: Kecamatan Plantungan Dalam Angka 2016

3. Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Plantungan tahun 2015 sebanyak 32.671 jiwa, terdiri dari 16.689 jiwa (50,94%) laki-laki dan 16.072 jiwa (49,06%) perempuan. Jumlah penduduk terbesar adalah Desa Wonodadi sebanyak 4.460 jiwa (13,61%) dari total jumlah penduduk Kecamatan Plantungan. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah Desa Kediten dengan jumlah penduduk 1.180 jiwa (3,60 %) dari total jumlah penduduk Kecamatan Plantungan. Sementara desa yang paling padat penduduknya adalah Desa Wonodadi dengan kepadatan penduduk sebesar 1.112 jiwa/Km². Kepadatan penduduk di Kecamatan Plantungan tahun 2015 sebesar 671 jiwa per Km². Hal ini menunjukkan bahwa setiap 1 Km² luas wilayah di Kecamatan Plantungan dihuni oleh sekitar 671 jiwa.

Jumlah penduduk menurut kelompok umur pada tahun 2015 terbanyak berada pada kelompok umur 10-14 tahun dengan jumlah sebanyak 2.821 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil berada pada kelompok umur 70-74 tahun yaitu sebesar 688 jiwa.

Table 2

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2006-2015⁷⁹

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2006	15.923	16.703	32.626
2007	16.172	17.177	33.349
2008	16.297	17.332	33.629
2009	16.382	17.421	33.803
2010	16.42	17.404	33.284
2011	16.465	17.393	33.858
2012	15.561	14.94	30.501
2013	15.682	14.834	30.516
2014	15.718	15.144	30.862
2015	16.689	16.072	32.761

Tabel 3

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Rasio

Dirinci Per Desa Tahun 2015

Desa/Kelurahan	L	P	Ratio per (100)
-1	-2	-3	-4

⁷⁹Keterangan : Data Tahun 2006-2011 sumber data Statistik Kecamatan Plantungan dan 2012-2015 data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal

01. Blumah	610	593	102,87
02. Tlogopayung	2.092	1.961	106,68
03. Kediten	593	587	101,02
04. Wonodadi	2.316	2.144	108,02
05. Manggugmangu	1.252	1.275	98,20
06. Tirtomulyo	1.941	1.936	100,26
07. Jurangagung	1.515	1.421	106,62
08. Karanganyar	919	963	95,43
09. Jati	587	575	102,09
10. Wadas	1.843	1.662	110,89
11. Bendosari	1.732	1.688	102,61
12. Mojoagung	1.289	1.267	101,74
Jumlah	16.689	16.072	103,84

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana penting dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, untuk itu diperlukan pasarana pendidikan yang bagus dan representative guna mendukung wajib belajar pendidikan 9 tahun.

Table 4

Data Pendidikan Kecamatan Plantungan

No	Uraian	Jumlah
1.	Paud	15 Buah
2.	Taman Kanak-Kanak (TK)	26 Buah
3.	Sekolah Dasar Negeri (SDN)	26 Buah
4.	Madrasah Ibtida'iyah (MI)	7 Buah

5.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	3 Buah
6.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	4 Buah
7.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1 Buah
8.	Pondok Pesantren	1 Buah

5. Data Ternak Sapi

Penduduk masyarakat Plantungan adalah bekerja sebagai tani, dengan memanfaatkan pekerjaan dan kegiatan pada pertanian sebagian besar masyarakat memanfaatkan memelihara ternak hewan salah satunya yaitu sapi.

Table 5.

Data Ternak Sapi Desa tahun 2015

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Sapi
1	Blumah	1,203	309
2	Tlogopayung	4,053	305
3	Kediten	1,180	289
4	Wonodadi	4,460	306
5	Manggugmangu	2,527	602
6	Tirtomulyo	3,877	310
7	Jurangagung	2,936	325
8	Karanganyar	1,882	330
9	Jati	1,162	75
10	Bendosari	3,420	282
11	Wadas	3,505	187
12	Mojoagung	2,556	191
	Jumlah	32,761	3,511

Sumber data: Penyuluh Peternakan Kecamatan Plantungan

6. Data Peribadatan

Penduduk Kecamatan Plantungan sebagian besar beragama Islam yaitu sebanyak 32.554 orang (97,28 %) dari total jumlah penduduk yang ada. Sisanya 207 orang (2,72 %) beraga Kristen, Katholik, Budha, dan Hindu. Dengan jumlah tempat ibadah sebaga berikut:

Table 5

Data Tempat Ibadah di Kecamatan Plantungan

No.	Uraian	Jumlah
1	Masjid	47
2	Musholla	214
3	Gereja	3

B. Praktik Sistem Pengupahan Pada Pemeliharaan Sapi Di Kecamatan Plantungan

Pengupahan pemeliharaan sapi yang dilakukan di Kecamatan Plantungan merupakan suatu akad sewa menyewa terhadap pengambilan suatu manfaat tenaga kerja manusia. Pelaksanaan pemeliharaan sapi di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal ini menguntungkan berbagai pihak, bagi pihak yang kekurangan modal merasa diuntungkan karena mendapat bantuan modal dari pemilik modal, sedangkan pemilik modal juga diuntungkan karena modal yang diberikan akan berkembang dan keuntungan bagi pihak pemelihara akan mendapat upah dari pemilik modal. Masyarakat di Kecamatan Plantungan sudah melakukan praktik pemeliharaan sapi dengan

sistem pengupahan ini sejak lama, dalam kegiatan pemeliharaan sapi ketentuan-ketentuan dan pengelolaannya sudah lama dilakukan.

Dalam pengelolaan sapi ini, pengelola modal bertugas memelihara dan mengembangkan modal yang diberikan pemilik modal berupa sapi. Sapi yang berupa modal tersebut akan dikembangkan dengan tujuan agar mempunyai anakan sehingga anakan sapi tersebut yang akan menjadi keuntungan bagi pemilik dan pemelihara, serta pembayarannya yakni dengan satu ekor anak sapi dan atau sebagaimana dengan ketetapan perjanjian diawal. Pengelola modal pada masa pemeliharaan bertanggung jawab terhadap semua perawatan sapi. Tidak semua pemeliharaan ditanggungkan kepada pemelihara, namun ada campur tangan dari pemilik modal (sapi), yaitu mengganti biaya perawatan ketika sapi mengalami gangguan kesehatan dan mengganti sebagian biaya suntik kawin.⁸⁰

Begitu pula pada saat waktu pengambilan sapinya, pemilik sapi hanya mengatakan apabila membutuhkan uang sewaktu-waktu maka sapi tersebut akan diambilnya dan menjualnya. Namun dari kebiasaan warga setempat rata-rata waktu pemeliharaan sapi yakni kurang lebih 2 s/d 4 tahun, tetapi hal tersebut belum menjadi patokan yang pasti, semua tergantung dari pihak pemilik sapi. Pemeliharaan sapi tidak ditentukan berapa lama waktu yang harus dikerjakan pada pemelihara oleh pihak pemilik. Diantara keduanya tidak ada kesepakatan kejelasan waktu, hanya kesepakatan upah yaitu bentuk uang maupun anak sapi.

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Cipto Hadi, Perangkat Desa Bendosari Kecamatan Plantungan pada tanggal 17 Mei 2017

Sistem pengupahan yang berlaku dimasyarakat pada umumnya, adanya kesesuaian kesepakatan harga upah, yaitu:

1. Dengan pengupahan 1 ekor anak sapi. Biasanya anak sapi yang pertama yang digunakan untuk mengupah,
2. Dengan pengupahan *maro bathi*. Dalam hal ini pemelihara sapi akan mendapat upah dari hasil penjualan anak sapi/*pedet*, ketika *pedet* terjual maka dari hasil penjualan tersebut dibagi dua, antara pihak pemilik sapi dan pihak pemelihara. Pembagian hasil tersebut yaitu pemilik sapi mendapat 60% dan untuk pihak pemelihara mendapatkan 40%-nya.
3. Selain dari hasil anak sapi dan hasil penjualan, kerugian juga biasa terjadi apabila sewaktu-waktu sapi yang dipelihara mati yang disebabkan oleh penyakit, tidak bisa beranak/*mandul* dan sebagainya, maka pemelihara akan mendapatkan upah lelah. Adapun besaran upah yang akan diterima oleh pemelihara yaitu sebagai berikut:
 - a. Bila perjanjian upah yang diberikan berupa anak sapi, namun setelah dipelihara dan dirawat ternyata sapi mandul maka upah lelah yang bisa terjadi pada warga masyarakat setempat yaitu rata-rata sekitar Rp. 500.000 s/d Rp. 1.000.000 dengan kisaran lamanya waktu memelihara mulai 7 bulan s/d 1 tahun lebih, dan itu semua tergantung dari pemilik sapi memberi upah banyak atau lebih.
 - b. Bila penjualan sapi tidak mendapat keuntungan maka besaran upah yang diberikan pemilik kepada pemelihara sekitar Rp. 500.000

kebawah, namun semuanya tergantung kepada pemilik sapi yang memberinya.⁸¹

Sistem pemeliharaan sapi menggunakan sistem perjanjian antara pemilik dan pengelola. Tanpa ada perjanjian tertulis, perjanjian dilakukan dengan menggunakan lisan saja. Persengkataan perjanjian tersebut sering kali masyarakat memanfaatkan kepada orang terdekat, keluarga maupun tetangga. Sehingga ketika ada suatu perselisihan atau permasalahan cukup diselesaikan dengan sistem kekeluargaan saja tanpa harus melibatkan pihak lain.

Adapun sitem kerja pemeliharaan sapi,yaitu:

1. Pemilihan Sapi

Dalam halpemeliharaan sapi apabila pemilik sapi kurang mengerti tentang memilih sapi yang sehat dan bagus terkadang pemilik modal mengajak pemelihara untuk memilih sapi sendiri yang nantinya akan dipeliharanya, dalam hal pemeliharaan sapi tersebut pemelihara harus benar-benar bisa memilih sapi yang nantinya untuk bisa dikembangkan. Pemelihan sapi yang sehat ini ada beberapa tanda-tanda yang dijadikan pembeda antara sapi yang sehat suka makan, dengan sapi yang tidak sehat atau mudah terserang penyakit biasanya sapi yang kurang suka makan.

Untuk mendapat sapi yang sehat dan bakal jadi calon indukan pemelihara harus benar-benar mengerti dengan kondisi sapi, dan dengan

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Sugianto, 15 April 2017

menggunakan keahliannya dan pengalamannya dalam pemeliharaan sapi, tanda-tanda yang menjadi patokan diantaranya meliputi:

- a. Perutnya ramping
- b. Badannya gemuk
- c. Pantatnya besar

2. Memelihara Sapi

Memelihara sapi membutuhkan pengalaman dan kesabaran dari pemelihara, tugas pemelihara diantaranya, yaitu:

- a. Memberi makan sapi

Dalam pemberian makan sapi pemelihara harus mencari rumput, biasanya masyarakat plantungan mencari rumput untuk sapi peliharaannya yakni sesudah dari bertani, dan setiap harinya petani ini harus mencari rumput. Hasil dari mencari rumput tadikemudian diberikan kepada sapi peliharaannya, biasanya dalam hal pemberian makanan pemelihara memberimakan sapinya sebanyak 3 kali sehari,yaitu setiap pagi, siang dan sore hari. Selain memberi makan rumput-rumputan terkadang dari oihak pemelihara juga memberikan makanan tambahan seperti ampas tahu, air tajin dan *dedek* (hasil olahan kulit padi) dalam pemberian *dedek* ini biasanya pemelihara mencampurnya dengan air agar makanan tersebut dapat dibuat minum oleh sapi pemeliharaan.

Pemberian makanan tambahan ini biasanya pemelihara memberikannya satu kali setiap harinya, bahkan kalau sapi terserang

penyakit maka pemberian makanan tambahan ini bisa menjadi makanan pengganti rumput, karena ketika sapi sedang sakit kebanyakan tidak mamemakan rumput. Oleh karena itu pemelihara sapi harus benar-benar dapat mengatasi hal tersebut untuk menjaga kesehatan sapi dan agar sapi tetep mau makan.

b. Membersihkan *kandang* (tempat) sapi

Dalam hal ini biasanya kandang untuk sapi ditempatkan dilingkungan rumah tempat tinggal pemelihara. Pembersihan kandang sapi ini sangat diperlukan karena untuk menjaga kesehatan sapi dan perkembangan sapi. Pemelihara membersihkan kandang sapi tersebut setiap hari, agar sapi-sapi yang dipelihara tetap sehat. Walaupun pemelihara sudah memperhatikan kebersihan kandang sapi,terkadang sapi tersebut masih bisa terserang penyakit yang disebabkan oleh faktor alam seperti musim hujan yang mengakibatkan penyakit diare terhadap sapi, maka dari pihak pemelihara harus bekerja secara ekstra untuk dapat menyembuhkan sapi yang sakit, dengan menyisihkan sedikit uangnya untuk memanggil mantri/dokter hewan.

c. *Ngomprong*(asap yang dibuat dari membakar rumput)

Sebagian warga masyarakat Plantungan masih menggunakan cara *ngomprong* untuk mengusir nyamuk. Dalam hal *ngomprong* ini pemelihara harus mengumpulkan rumput-rumput bekas makan sapi yang nantinya dibakar dan menghasilkan asap-asap yang sangat

banyak yang dimanfaatkan untuk mengusir nyamuk, hal ini biasa dilakukan mulai sore hari dan diusahakan tetap menyala sampai keesokan harinya dan agar pembakaran ini tetap menyala maka setiap malam sekali pemelihara harus mengeceknya dan hal ini dilakukan setiap hari. Namun saat ini sudah banyak warga yang menggunakan obat nyamuk bakar karena tidak mau repot dan takut beresiko terjadinya kebakaran.⁸²

d. Suntik Kawin

Pembudidayaan ternak sapi indukan harus membutuhkan perawatan dan ketelatenan yang tinggi. Agar cepat berkembang dan memberikan hasil yang signifikan, biasanya para pemelihara atau peternak sapi umumnya melakukan inseminasi buatan pada sapi. Ada beberapa faktor yang harus dipahami oleh para pemelihara sapi, yaitu:

- 1) Kesehatan indukan sapi
- 2) Masa birahi
- 3) Tingkat pemenuhan nutrisi dan makan
- 4) Metode inseminasi yang digunakan

Selain hal itu pemelihara harus mengetahui kapan waktu sapi itu dalam masa subur sehingga tepat dalam melakukan inseminasi buatan. Indukan sapi selain sehat secara fisik juga sehat dalam bagian reproduksinya yang dapat diketahui melalui beberapa ciri,

⁸²Wawancara dengan Bapak Haryadi, warga Karanganyar pada tanggal 25 Mei 2017

misalnya dengan masa siklus sapi atau masa pelepasan sel telur (masa subur). Dalam tahap ovulasi yang normal pada hewan ternak sapi yaitu rata-rata 20 s/d 25 hari. Dan pemelihara biasanya melakukan suntik kawin atau inseminasi buatan ini ketika sapi sedang masa birahi.

Ciri-ciri sapi sedang masa estrus:

- 1) Tingkat nafsu makan pada sapi berkurang
- 2) Sapi biasanya tidak bisa tenang atau diam
- 3) Kondisi sapi yang terlihat gusar, gelisah, sering melenguh atau mengeluarkan suara.⁸³

e. Waktu Kerja Pemeliharaan Sapi

Pemelihara sapi biasanya melakukan pekerjaannya, yaitu:

- 1) Dimulai dari pagi hari sekitar habis sholat subuh sebelum pemelihara pergi ke sawah/ladang pemelihara akan membersihkan kandang sapi dari kotoran-kotoran sapi, pembersihan kandang dilakukan setiap hari.
- 2) Pemberian makan sapi yang berupa rumput-rumputan biasanya pemelihara akan memberikan makan sapi peliharaanya tersebut sebanyak 3 kali sehari, yaitu pada saat pagi hari sekitar jam 06.30 WIB, siang hari pada waktu dhuhur atau jam 13.00 WIB, dan pada sore hari sekitar jam 17.00 WIB. Untuk makanan

⁸³ Wawancara dengan ibu Anik *mantri hewan* (dokter hewan) pada tanggal 10 Oktober 2017

tambahan seperti sisa pembuatan tahu, *dedek*, dan air tajin diberikan setiap satu kali sehari.

Selain mengurus dan memelihara sapi pemelihara sapi juga mempunyai tanggung jawab dalam mencari rumput, dan biasanya dilakukan setelah selesai bertani sekitar jam 10.00 WIB.⁸⁴ Resiko dalam memelihara sapi tidak sedikit sapi yang bisa memberikan keturunan, dari yang sapi mandul sampai sapi yang ketika sudah hamil mengalami keguguran atau bahkan sapi mati. Saat musim kemarau mencari rumput untuk pakan sapi sangat sulit, bahkan harus mencari rumput yang jaraknya cukup jauh, yaitu jarak 15 km sampai 50 km. Sulitnya mencari rumput kadang dari pihak pemelihara harus membelikan pakan sapi dari sisa pembuatan tahu dan *dedek*.

Pelaksanaan kesepakatan akad dengan cara pemilik modal bersilaturahmi terlebih dahulu kepada seseorang yang akan dimintainya untuk memelihara sapi miliknya, pemilik modal biasanya menanyakan kesanggupannya apa tidak, jika diapun menyanggupi maka pemilik modal melanjutkan kesepakatan yakni sistem pengupahan dan pemeliharaan yang kemudian disepakati bersama, perkataan yang sering diungkapkan dalam menentukan kesepakatan ini yaitu:

Pemilik : *“Lek aku rene meh jaluk tulung, iki aku ono duwet rencana meh tuku sapi indukan kanggo nyelengi ben karo duwe ingon-ingon, iki sampean takkon ngopenke.*

Pemelihara : *“ La arep tuku kapan sapine?”*.

⁸⁴ Wawancara Ibu Siti Samsiyah, Warga Jurangagung pada tanggal 03 Juni 2017

Pemilik : “ *Yo mengko sekalian tuku karo sampean, sampean seng ngerti sapi, sampean yo seng milih sekalian* ”

Pemelihara : “*Yo... sesok yo lek*”? ⁸⁵

Terjemah

Pemilik : “mas, saya kesini mau minta tolong, ini saya ada uang renacana mau buat beli sapi untuk simpenan dan juga bisa punya hewan ternak, ini saya menyuruh kamu buat memeliharakannya”

Pemelihara : “untuk sapinya kira-kira mau beli kapan?”

Pemilik : “iya nanti sekalian beli bareng kamu, kamu yang tahu tentang sapi, sekalian nanti kamu yang milih”

Pemelihara : “iya... besok ya mas?”

Setelah ada kesanggupan dari pemelihara sapi keduanya melakukan tawar menawar bagaimana sistem pengupahannya dan besarnya upah yang akan diberikan kepada pemelihara sapi dan kemudian disepakati bersama.

Pemeliharaan ternak sapi dengan sistem pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat Plantungan Kabupaten Kendal pada dasarnya dilandasi oleh sikap saling memahami dan tolong menolong karena kedua belah pihak saling membutuhkan, dari pihak pemilik modal atau pemilik sapi membutuhkan tenaga keahlian pemeliharaan dari pihak pekerja, dan pihak pekerja membutuhkan upah dari pemilik modal.

⁸⁵ Wawancara dengan bapak Yono pemilik sapi dan Bapak Casman pemelihara sapi, pada tanggal 14 Juni 2017

Hasil penelitian yang penulis dapatkan dari wawancara dengan beberapa warga masyarakat Kecamatan Plantungan terutama yang berprofesi sebagai pemelihara sapi banyak kesenjangan antara kesepakatan diawal dan pada berakhirnya akad,yaitu upah yang diberikan kepada pemelihara tidak sedikit yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati diawal. Sistem pengupahan yang tidak sesuai dengan apa yang telah di sepakati pada awal akad mengakibatkan adanya perselisihan antara pemelihara dan pemilik, tetapi hal tersebut tidak bisa dibawa keranah hukum karena tidak adanya bukti tertulis yang akan bisa menjadi bukti, kebiasaan dari masyarakat sendiri karena selalu memanfaatkan tenaga dari lingkup keluarga, tetangga. Ketika perselisihan dan ketidak sesuaian kesepakatan terjadi mereka cukup bermusyawarah dengan cara kekeluargaan.⁸⁶

Data Informan yang menjadi arahan pada penelitian

No	Nama	Status	Alamat	waktu
1	Cipto Hadi	Perangkat Desa	Ds. Bendosari	16 Mei 2017
2	Samsi	Perangkat Desa	Ds. Bendosari	13 April 2017
3	Sariyan	Pemilik	Ds. Bendosari	13 April 2017
4	Tohirin	Pemelihara	Ds. Tirtomulyo	20 Mei 2017
5	Solehudin	Perangkat Desa	Ds. Blumah	05 juni 2017
6	Haryadi	Pemilik	Ds. Karanganyar	25 Mei 217
8	Casman	Pemelihara	Ds. Tlogopayung	14 Juni 2017
9	Sugi	Pemelihara	Ds. Karanganyar	15 April 2017
10	Suyono	Pemelihara	Ds. Kediten	23 Apri 2017
11	Sugianto	Blantik	Ds. Mojoagung	15 April 2017
12	Siti Samsiyah	Rumah Tangga	Ds. Jurangagung	03 Juni 2017
13	Anik	Dokter Hewan	Ds. Jurangagung	10 Oktober 2017

⁸⁶*Ibid.*, Bapak Cipto Hadi.

Untuk melengkapi karya ilmiah ini, maka penulis mengadakan wawancara dengan beberapa masyarakat setempat.

1. Bapak Supandi wawancara yang dilaksanakan pada 13 April 2017. Beliau adalah seorang buruh tani serta melakukan kerja sampingan sebagai pemelihara sapi di Desa Mojoagung Kecamatan Plantungan. Bapak Supandi ini memelihara sapi milik orang lain sudah berganti dengan beberapa orang pemilik sapi. Menurut beliau upah yang didapat dari pemeliharaan sapi ini tidak sebanding dengan apa yang telah dikerjakan, kalau yang punya sapi orangnya *loman* (dermawan), pengertian pengeluaran sekecil apapun dalam pemeliharaan sapi diperhitungkan dan diganti bahkan terkadang uang dilebihkan dari pemilik sapi. Namun beliau pun sering mengalami kerugian, yakni kerugian tenaga, kerugian dari pendapatan upah, dari pemilik sering tidak tepat pada apa yang telah disepakati di awal. Beliau mengatakan pada awal perjanjian upah yang didapat yaitu anak sapi, dan dari kebiasaan masyarakat anak sapi pertama untuk pemelihara dan anak sapi berikutnya untuk pemilik, namun dalam kenyataan beliau hanya menerima uang Rp. 3. 500.000 saja dengan masa pemeliharaan 3 tahun yang sebenarnya sapi sudah beranak beberapa kali namun diminta sama pemilik.
2. Bapak Tohirin wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2017. Beliau adalah seorang yang bekerja sebagai buruh pemelihara sapi. Beliau yang sudah bekerja dengan bapak Shodikin selama kurun waktu 2 tahun hanya mendapat upah sebesar Rp. 2.700.000, yang pada awal

perjanjian dengan menggunakan sistem *maro bathi*, yaitu dengan kesepakatan hasil jual anak sapi dibagi dua antara pemilik dan pemelihara, namun pada akhir akad jumlah upah yang diterima tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati diawal dan tidak sesuai dengan jumlah pembagian uang hasil penjualan anak sapi tersebut.

3. Bapak Casman wawancara dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2017. Beliau adalah seorang yang bekerja sebagai pemelihara sapi. Pendapatan beliau hanya mengandalkan upah dari hasil pemeliharaan sapi. Beliau memelihara sapi milik Bapak Yono, pada awal akad dilaksanakan pada bulan februari tahun 2016 dimana dalam perjanjian ini bapak Casman akan mendapat hasil upah anak sapi yang kebetulan Bapak Yono sebagai pemilik sapi pada waktu membelinya sapi dalam keadaan sudah hamil, dan ketika masa pemeliharaan baru 7 bulan tepat pada bulan Oktober 2016 sapi sudah menghasilkan anak, namun pada bulan januari 2017 sapi di ambil dan di jual oleh pemilik, dan bapak Casman hanya mendapat aung sebesar Rp. 1.500.000 saja tanpa ada penjelasan mengenai anak sapi tersebut.
4. Bapak Sugi wawancara dilaksanakan pada tanggal 15 April 2017. Beliau adalah seorang guru honorer yang bekerja sampingan dengan buruh memelihara sapi milik orang lain. Disamping memelihara sapi orang lain beliau juga memiliki sapi hasil upah dari beliau buruh memelihara sapi 4 tahun yang lalu. Menurut beliau kalau hanya mengandalkan dari gaji honorer tidak akan mampu menabung untuk kehidupannya dimasa depan.

Dengan modal tenaga dan keahliannya beliau dipercaya orang untuk memelihara sapi. Pada tahun 2013 seseorang menitipkan sapi kepada beliau untuk dirawatnya dan di awal kesepakatan pemilik menyanggupi akan memberi upah Rp. 2.500.000 pertahunnya dan pada tahun 2015 pemilik menambahkan sapi lagi satu ekor dan dengan jumlah upah yang tetap. Di tahun 2017 lalu pemilik mengambil sapi dengan alasan untuk modal nikah anaknya. Setelah sapi di jual dan hitngan di tahun akhir pemilik hanya memberi upah hitungan 1 tahun sebanyak Rp. 1.500.000.

Melihat hal tersebut adanya ketidak adilan pada Bapak Sugi, dimana hitungan memelihara satu ekor sapi dan dua sapi dengan upah yang sama dan pada akhir akad upah selama satu tahun tidak sesuai dengan kesepakatan di awal.

5. Bapak Suyono wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 April 2017. Beliau adalah seorang buruh tani serta buruh memelihara sapi milik tetangga. Menurut beliau dengan keahliannya dalam memelihara sapi sangat membantu atas tambahkan pemasukannya walaupun upah yang ia terima tidak sesuai dengan upah yang telah ddisepakati pada awal akad. Tahun 2014 lalu beliau memelihara sapi milik tetangga yang hanya beda Rt saja dan yang beliau pelihara yaitu sapi penggemukan. Upah yang telah keduanya sepakati yaitu dengan *maro bathi* yaitu hasil dari penjualan sapi dibagi dengan ketentuan pembagian masing-masing 50%. Waktu pemilik membeli sapi di tahun 2014 ketika sapi berumur 4 bulan dengan harga Rp. 10.700.000, dan pada tahun 2016 pemilik mengambil dan menjual dengan harga bersih Rp. 24.300.000 dan laba dari hasil penjualan yaitu Rp. 13.600.000. Namun hasil uang yang diterimanya hanya Rp. 5.500.000 saja.

Pembagian yang tidak sesuai dengan hasil kesepakatan membuat bapak Suyono merasa dicurangi, ketika beliau meminta keadilan kepada pemilik namun dari pemilik tetap bersikukuh memberikan bagian dengan jumlah tersebut dengan alasan-alasan yang banyak

6. Bapak Sariyan wawancara dilaksanakan pada tanggal 13 April 2017. Beliau adalah pemilik sapi dan keseharian beliau adalah seorang buruh bangunan dan beliau merantau di Jakarta. Beliau menitipkan sapi kepada Bapak Kadir selama 17 bulan agar sapi bisa dipeliharanya. Pada waktu perjanjian diawal keduanya bersepakat dengan mengambil hasil anak sapi dengan pembagian hasil jual sapi di bagi 40% untuk pemelihara dan 60% untuk pemilik. Namun dengan hasil penjualan anak sapi dulu dengan harga Rp. 13.700.000 beliau hanya memberi bagian kepada pemelihara yaitu sebesar Rp.500.000. Karena menurut beliau pada saat itu sedang membutuhkan biaya untuk pengobatan. Dengan hasil musyawarah dengan pemelihara dan pemelihara pun rela dengan menerima jumlah hasil pembagian tersebut.
7. Bapak Haryadi wawancara dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2017. Beliau adalah pemilik sapi dan beliau bekerja di PJTKI daerah Batang, dan setiap harinya harus berangkat pagi dan pulang juga terkadang sampai malam, tidak ada waktu buat mencari makan dengan begitu beliau menitipkan sapi kepada tetangganya hitung-hitung memberi lapangan pekerjaan. Sapi yang beliau miliki dengan jenis sapi indukan, dulu pada awal perjanjian ketika sapi beranak anak yang pertama dikasih untuk pemelihara, dan jika sampai sapinya beranak lagi maka anak sapi yang kedua milik bapak Haryadi selaku pemilik. Namun setelah dipelihara kurang lebih satu tahun setengah ternyata sapi tidak mendapatkan hasil atau mandul. Dengan begitu bapak haryadi menjaulnya dan hanya memberi upah kepada pemelihara sebesar Rp.2.500.000 hanya sebagai uang lelah.

Menurut dari tokoh masyarakat di Kecamatan Plantungan sistem pengupahan yang dilakukan di Kecamatan Plantungan itu sangat membantu

dalam memenuhi perekonomian masyarakat. Melihat kondisi wilayah Kecamatan Plantungan yang minim dengan adanya lapangan pekerjaan dengan sistem seperti itu bisa menambah penghasilan perekonomian masyarakat. Namun dengan melihat adanya ketidak sesuaian mengenai upah yang telah disepakati mengakibatkan ketidakadilan kepada buruh ataupun pemelihara. Beberapa dari pemelihara terkadang sampai ada yang mengadu lewat kantor kelurahan untuk bisa membantu dalam penyelesaian perselisihan tersebut namun banyak juga yang hanya dengan msyawarah kekeluargaan saja. Sulitnya tidak ada bukti tertulis maka tidak bisa dibawa keranah hukum.⁸⁷

⁸⁷ Bapak Rahmadi, Perangkat Desa Karanganyar, pada tanggal 14 juni 2017

BAB IV

ANALISIS PENGUPAHAN PEMELIHARAAN SAPI DI KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL

A. Analisis Praktik Sistem Pengupahan Pemeliharaan Sapi di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal

Telah dijelaskan dalam bab III bahwa bentuk kerja pemeliharaan adalah pekerjaan yang harus dijalani pemelihara untuk memelihara, dalam hal ini pemelihara terkadang sudah melakukan pekerjaannya dalam hal pemilihan sapi, memelihara, dan mencari rumput untuk makan sapi peliharaannya, dan pemelihara akan mendapat upah atau kompensasi berupa upah.

Praktik pemeliharaan sapi dengan sistem pengupahan yang dijalankan masyarakat Plantungan Kabupaten Kendal akan dapat melestarikan nilai-nilai kebersamaan, saling menolong dan membantu program pemerintah, yaitu setiap warga Negara berhak mendapat penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang salah satunya adalah mendapat penghidupan yang layak. Dan Islam juga menganjurkan agar sesama umat manusia hidup saling tolong menolong, bergotong royong, bantu memabantu terhadap sesama atas dasar tanggung jawab bersama, sebagaimana dalam firman Allah dalam al-Quran pada surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:



Artinya: *Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*⁸⁸

Praktik *ujrah* pada pemeliharaan sapi dengan sistem *maro anak* dan *maro bathi* yang dijalankan masyarakat Plantungan Kabupaten Kendal juga membantu masyarakat dalam adanya lapangan pekerjaan pemeliharaan sapi. Hal ini sangat berpotensi besar terhadap pengurangan pengangguran dan memanfaatkan tenaga, keahlian dan keuletan dari masyarakat di Kecamatan Plantungan.

Ketentuan pemberian upah dan besarnya upah yang dibayarkan kepada pemelihara sapi ditetapkan sebelum dimulainya pemelihara melakukan pekerjaannya, dimana pemilik sapi terlebih dahulu menjelaskan kepada pemelihara bahwa pemilik sapi membutuhkan tenaga kerja untuk memelihara sapi miliknya, biasanya pemilik sapi akan meminta pada sanak famili atau tetangga terdekat yang sudah mempunyai keahlian atau yang sudah biasa memelihara sapi dan yang dipercayainya untuk memelihara sapi, dalam hal tersebut pemilik tidak lagi menjelaskan mengenai sistem kerjanya, karena pemelihara lebih paham bagaimana memelihara sapi.

Meski dalam pemeliharaan sapi ini sangat bermanfaat bagi sesama terutama membantu dalam hal penambahan perekonomian orang lain dan dapat mengurangi persentase pengangguran, namun jika dalam praktiknya tidak sesuai atau tidak lazim pasti akan menimbulkan berbagai permasalahan.

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015) hlm. 106

Pengupahan semacam itulah yang terjadi di Kecamatan Plantungan, ketidak sesuaian jumlah atau bentuk yang telah disepakati atas keduanya.

Sebagai contoh: pada tahun 2012 ada kesepakatan kerjasama antara pemodal sebagai pemilik sapi dan pengelola sebagai pemelihara sapi keduanya melakukan kesepakatan atas kerjasama tersebut. Dengan kesepakatan upah yaitu satu ekor anak sapi dengan ketentuan masa pemeliharaan sampai sapi itu beranak lebih dari 1 kali, ketika sapi hanya menghasilkan satu ekor anak sapi itu sudah menjadi hak milik pemelihara dan itu sudah disepakati di awal yang telah disetujui atas kedua belah pihak, namun selang beberapa tahun kemudian sapi hanya membuahkan satu ekor anak sapi saja, dan dari pemilik meminta agar anak sapi itu dijual dan hasilnya dibagi dua.

Terlepas dari benar atau salah, bagi pemilik sapi yang demikian dirasa sudah sesuai dengan alasan. Pengupahan itu terjadi karena sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Islam menganjurkan pula agar hubungan kehidupan dalam satu individu dengan individu yang lain dapat ditegakkan atas dasar nilai-nilai keadilan, supaya dapat terhindar dari tindakan yang tidak terpuji. Bentuk kesepakatan di awal ketika melakukan proses perjanjian *ijarah* pengupahan pemeliharaan sapi antara pemilik sapi dan pemelihara yang jelas dengan hak dan kewajiban masing-masing seharusnya dapat dijaga agar terhindar dari perselisihan.

Masyarakat Kecamatan Plantungan kabupaten Kendal ini masih bersifat tradisional, sehingga cara berfikirnya pun masih tradisional. Mereka masih berpegang/bergantung pada adat kebiasaan yang telah berlaku sejak lama. Sebagaimana proses pemeliharaan sapi di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal ini juga disebabkan karena faktor kebiasaan/adat istiadat (*'urf*). Praktik pengupahan dalam pemeliharaan sapi yang dilakukan di masyarakat Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal sudah berlangsung sejak lama dan tidak diketahui kapan dimulainya. Sehingga menjadi adat istiadat yang sudah berkembang dimasyarakat dan tidak dapat dihindari. Masyarakat menganggap praktik pengupahan pemeliharaan sapi yang dilakukan di kalangan masyarakat Kecamatan Plantungan adalah hal yang biasa dan wajar hukumnya. Atas dasar inilah praktik pemeliharaan sapi dengan sistem pengupahan yang dilakukan masyarakat Plantungan ini tetap berjalan sampai sekarang.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pemeliharaan Sapi di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal

Perjanjian kerja dan akad tentang pengupahan sapi telah dijelaskan di bab III dimana sebelum pemilik sapi menyerahkan sapi kepada pemelihara, pemilik sapi membicarakan dulu kepada pemelihara tentang berapa besar upah yang akan diterima oleh pemelihara dengan sistem berupa pedet atau dengan *maro bathi*, sedangkan sistem pemeliharaan sepenuhnya diserahkan kepada pemelihara.

Konsep *ijarah* telah dijelaskan bahwa islam telah mensyariatkan adanya ikatan perjanjian kerja dan didalam perjanjian kerja tersebut harus memenuhi rukun dan syarat-syarat *ujrah*.

1. *Aqid* (orang yang berakad)

Pelaku akad (*al-ma'jir* dan *al-muta'jir*) merupakan orang yang menerima dan memberikan upah dan yang menyewakan sesuatu, disyaratkan pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu, baligh, berakal, bertindak menurut hukum.

2. *Sighat*

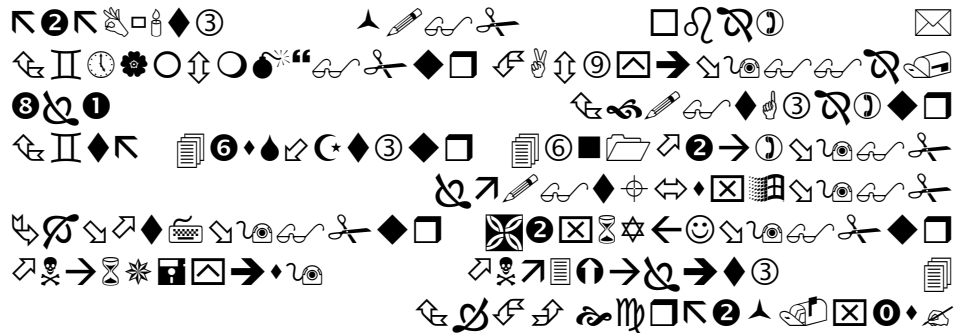
pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sighat al-'aqd*) yang terdiri dari ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian islam, ijab dan qabul dapat melalui:

- a. Ucapan
- b. Perbuatan
- c. Isyarat
- d. Utusan atau tulisan⁸⁹

3. *Ujrah* atau upah

Menyangkut dalam hal penentuan upah kerja, islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan al-Quran maupun dalam sunnah Rasul. Secara umum dalam al-Quran yang ada kaitannya dengan upah kerja dapat dijumpai dalam surah An-Nahl ayat 90:

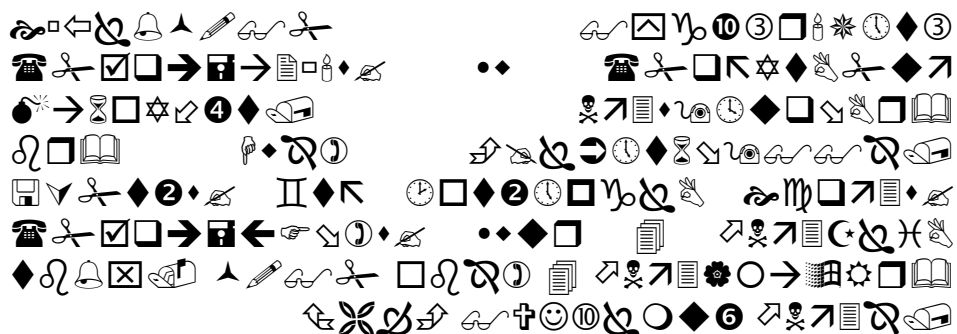
⁸⁹ Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.*, hlm. 46-51



Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁹⁰

4. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad. Firman Allah

dalam surat An-Nisa’ ayat 29:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁹¹

Mengenai syarat-syarat upah yaitu:

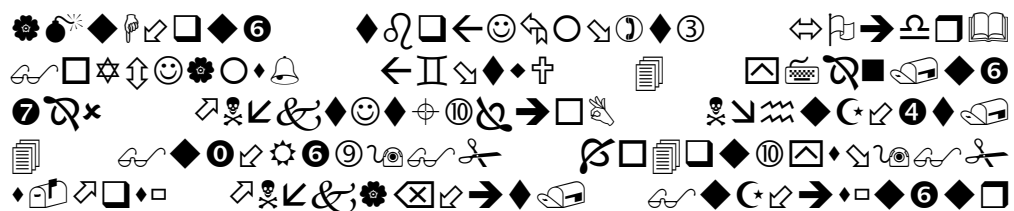
⁹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015) hlm.277

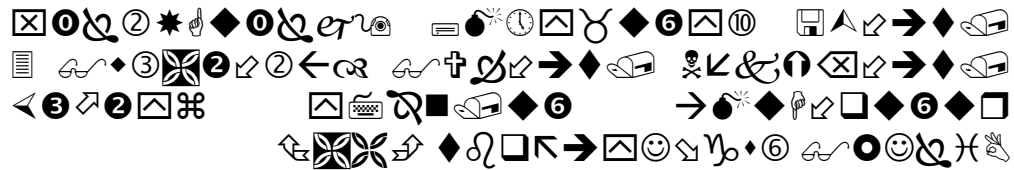
⁹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010) hlm. 83

1. Upah harus jelas
2. Upah harus dibayarkan segera mungkin
3. Upah bisa dimanfaatkan oleh pihak untuk memenuhi kebutuhannya
4. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga
5. Upah yang dipastikan kehalalannya
6. Barang pengganti upah tidak cacat.

Konsep *Ijarah* yang telah dipaparkan dalam bab II bahwa konsep pengupahan ada didalam bab *Ijarah* sehingga dalam konsep *Ujrah* bahwasannya dalam hubungan kerja antara pemilik dan pemelihara sapi diharuskan adanya pengupahan yang disebut dengan *Ujrah*, karena *Ujrah* sendiri merupakan pemanfaatan jasa yang harus disertai dengan pembayaran upah atas kompensasi atas jasa para pekerja yang disewaoleh pemilik sapi, didalam al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97 pada ayat tersebut Quraish Shihab menafsirkan bahwa kata-kata balasan dalam ayat tersebut adalah upah atau kompensasi. Besaran upah yang ditetapkan harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pemelihara.

Besaran upah sendiri Islam menjelaskan bahwa terdapat perbedaan baik itu dikarenakan beberapa sebab, perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan dan keadilan, perbedaan ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 32:



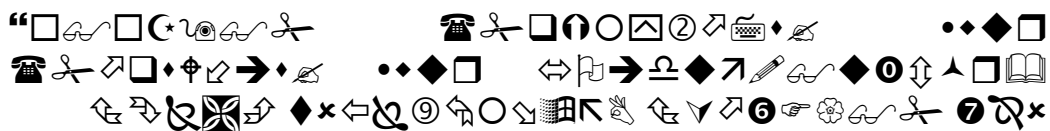


Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan anatara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa drajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”⁹²

Pengupahan sendiri pernah dilaksanakan oleh Nabi Saw, yakni dalam hadits riwayat bukhori di dalam bab *Ijarah* yang menjelaskan bahwa Nabi pernah mengupah juru bekam setelah Nabi berbekam.

Pemberian upah dalam Islam juga harus menerapkan asas keadilan. Adil disini dipandang dari segi proposionalnya yakni layak dalam arti sesuai dengan pasaran, jika dilihat dari layak tersebut besaran upah dari pemelihara sapi menerima upahnya ketika dikalkulasikan perbulannya maka upah pemelihara sapi lebih sedikit dibanding dengan upah dari hasil pekerjaan yang lainnya.

Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 183 Allah berfirman:



⁹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010) hlm. 491

Artinya: “*Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya janganlah kamu dimuka bumi dengan membuat kerusakan*”⁹³

Bahwasannya dijelaskan tentang merugikan saudara kita upah hasil dari anak sapi/ *pedet*, maupun dari *maro bathi* masih kurang memperhatikan keadilan. Hal ini tidak sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nisa' 29, yang menjelaskan bahwa kita tidak boleh mendholimi saudara kita, namun dengan realita yang ada dimasyarakat bahwa pengupahan dengan sistem bagi anak/*pedet* maupun *maro bathi* tersebut telah menjadi kebiasaan dalam lingkungan masyarakat setempat sehingga kalau ditinjau dari kaidah hukum Islam yang menyebutkan bahwa kebiasaan yang berlaku dalam pembayaran upah kerja dapat menjadi pedoman masing-masing pihak yang berkepentingan.

Sistem pengupahan harus diberikan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Adil secara bahasa mengandung dua arti, tidak berat sebelah dan sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dalam Islam juga keadilan sosial ditegakkan berdasarkan tiga asas, yaitu:

1. Kebijakan jiwa yang mutlak
2. Persamaan kemanusiaan yang sempurna
3. Jaminan sosial yang kuat.⁹⁴

⁹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010) hlm. 374

⁹⁴Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif muhamad, cet. Ke-2 (Bandung: Pustaka Pelajar, 1415 H/1994M) hlm. 43

Segala sesuatu yang telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat akan ditetapkan sebagai suatu hukum jika adat istiadat itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Sebagaimana dalam kaidah fiqh disebutkan yaitu:

الْعُرْفُ عَرَفًا كَمَا لَشَرَطٍ شَرْعًا

Artinya: *"apa-apa yang dimengerti secara 'urf adalah seperti apa yang disyaratkan menurut syarat"*

Juga kaidah tentang adat istiadat yang biasa dijadikan hukum yang berlaku dimasyarakat.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: *"Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum"*.⁹⁵

Analisis diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian upah yang diberikan kepada pemelihara diperbolehkan dan dianjurkan dalam Islam, namun besaran upah tersebut harus dapat memenuhi kelayakan untuk pemelihara sehingga kesejahteraan pemelihara dapat terpenuhi.

Praktik pemberian upah terhadap pemeliharaan sapi yang mana pemeliharaan akan mendapat upah dari hasil anak sapi/*pedet* maupun dari hasil keuntungan penjualan *pedet*, maka ketika anak sapi lahir diserahkan kepada pemelihara dan ketika upah dari hasil penjualan maka dibagi dua antara pemilik sapi dengan pemelihara, tetapi kadar pengupahan tidak sesuai dengan hasil kesepakatan serta masa kerja yang dilakukan oleh pemelihara sapi. Begitu juga bila induk sapi itu tidak bisa beranak maka pemelihara sapi hanya akan mendapatkan uang lelah dari pemilik sapi yang jumlahnya

⁹⁵ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. I, Bandung: Al Ma'arif, 1986, hlm. 517-518

bersifat suka rela. Sedangkan kadar uang lelah tersebut juga belum tentu sesuai dengan masa dan kerja yang telah dilakukan oleh pemelihara sapi.

Pemberian upah (*al-Ujrah*) itu hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang sama bagi majikan adalah membayar upah sebagaimana yang telah disepakati atas keduanya.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri

Sedangkan mengenai praktiknya, harus ada keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. Jelas ini tidak sesuai dengan praktik pengupahan pemeliharaan sapi, karena pada akhirnya pemelihara merasa terdzalimi. Meski tidak diutarakan secara langsung bentuk penzdaliman tersebut, namun hal ini terlihat dari sikap pemelihara yang merasa dicurangi dari besarnya atau bentuk upah yang ada.

Pada dasarnya dalam pola masyarakat Islam, upah bukan hanya merupakan suatu kompensasi, akan tetapi merupakan hak asasi bagi buruh yang dalam penetapannya harus memenuhi tiga asas, yaitu asas keadilan, asas kelayakan, asas kebajikan.

1. Asas keadilan menuntut agar upah buruh atau pekerja dibayar secara seimbang atas jasa yang telah diberikan oleh pekerja. Untuk dapat memberikan standar upah yang adil dapat dilihat keadilan dari dua aspek, yaitu:
 - a. Keadilan distributif yang menuntut agar para buruh yang melaksanakan pekerjaan sama dengan kemampuan dan kadar kerja yang berdekatan, memperoleh upah yang sama, tanpa memperhatikan kebutuhan individu yang berkenaan dengan kondisi keluarganya.
 - b. Keadilan harga kerja yang menuntut agar para pekerja diberikan upah seimbang dengan jasa yang telah diberikan, tanpa dengan dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan yang hanya menguntungkan para pemilik pekerjaan saja.
2. Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja dengan taraf hidup masyarakat, sehingga buruh atau pekerja dapat layak, tidak hanya berdasarkan tingkat ekonomi semata saja.
3. Asas kebajikan yang dalam hubungan kerja dapat diterjemahkan sebagai asas kerohanian dan diharapkan mampu mengugah hati nurani para pemilik pekerjaan untuk dapat menghargai jasa para pekerja yang telah memberikan sumbangan untuk mendapatkan kekayaan yang lebih.⁹⁶

⁹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, cet. Ke-4 (Bandung: Mizan, 1416 H/ 1996 M) hlm. 191

Dari praktik sistem pengupahan tersebut juga menggunakan sistem *Mudharabah* (bagi hasil), dimana dalam praktik tersebut adanya praktik dengan sistem *maro bathi*, yakni pembagian hasil laba atau untung dari hasil penjualan sapi yang menggunakan sistem sapi penggemukan.

Analisis diatas dapat dilihat bahwasannya praktik pembayaran upah yang diberikan kepada pemelihara sapi di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal tidak sesuai dengan perjanjian awal yaitu pihak pemilik sapi membayarkan upahnya tidak sama dengan apa yang telah dimusyawarahkan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu:

1. Praktik pengupahan pemeliharaan sapi di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal dilaksanakan sebagai berikut: pertama, dengan menggunakan sistem *maro anak* yaitu upah yang diberikan berupa anak sapi (*pedet*) yang biasanya anak sapi yang pertama yang digunakan sebagai bentuk upah. Kedua menggunakan sistem *maro bathi* yaitu pengupahan yang diberikan berupa keuntungan dari hasil penjualan sapi. Namun dalam pelaksanaan yang terjadi di Kecamatan Plantungan ini *Ajr* (buruh) tidak dibayar dengan apa yang telah disepakati di awal akad.
2. Menurut ketentuan hukum Islam mengenai *Ijarah nafs* pada pengupahan atas jasa pemeliharaan sapi di Kecamatan Plantungan tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam praktik pemeliharaan sapi yang dilakukan masyarakat Kecamatan Plantungan banyak yang menggunakan kata akad pengupahan atau menggunakan akad *ijarah*, melainkan dalam pelaksanaannya masyarakat Plantungan lebih menggunakan sistem *mudharabah*.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemilik sapi dalam hal memelihara sapi harus agar dalam melakukan pengupahan kepada pemeliharanya, pemilik sapi juga memperhatikan hak-hak dari buruh khususnya kepada pemelihara, dan agar besaran upah yang dibayarkan kepada pemelihara sepadan dengan apa yang telah dikerjakan oleh pemelihara, dan yang telah memenuhi kelayakan sehingga kesejahteraan para pemelihara dapat terpenuhi.
2. Praktik pengupahan dapat dilaksanakan sesuai dengan ajaran hukum Islam dan tidak merugikan yang lain juga memperjelas akad perjanjian agar nantinya tidak ada pihak yang merasa dizalimi.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada ditangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi peneliti umunya untuk semua pemerhati ekonomi Islam, *Waallahu A'lam*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Abani, Muhammad. 2007, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam
- Al Aziz, Moh. Saifullah. 2005, *Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya: Terang Surabaya
- Alamsyah, FahmiVidi. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap sistem Upah Tenaga KerjaPada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga*. Purwokerto: IAIN Purwokerto
- Al-Bukhari. 2004, *Shahih al-Bukhari, juz II*, Bandung: Pustaka Setia
- Al-Hafiz, Muhammad Ibn Yazid. Abu ‘Abdillah al-Qazwini Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Kitab al Ahkam bab Ajr al-Ujarah. Bairut Daral Fikr
- Al-Jaziri, Abdar-Rahmana. 1996. *Kitab al-Fiqih’ala, al-Mazahib al-Arba’ah*. Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra
- Al Jurjawi, Ali Ahmad. 1992, *Terjemahan Falsafat dan Hukum Islam*, Semarang: AsySifa’
- Abd al Tsafi, Muhammad Abd al Salam. Tt, *Musnad al Imam Ahmad Ibn Hambal*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah
- An-Nabhani, Taqyuddin. 1996, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti
- Anwar, Syamsul. 2007, *Hukum Perjanjian Syari’ah: Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Arikunto, Suhartini. 2006. *Prosedur Penelitian*, cet. Ke-13, Jakarta: Rineka Cipta
- As-Sahuri, Abdar-Razzaq Ahmad. *Aqd Al-Ijarah*, Beirut: Dar al-Fikri
- Asikin, Zaenal. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Grafindo Persada
- Azwar, Saifudin. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, cet. Ke-5, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Az-Zuhaily, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islāmwa Adillatuh*, Beirut: Libanon, Darul al-Fikri
- Basyir, Ahmad Azhar. 1987, *Hukum Islam Tentang Waqaf, Ijarah, dan Syirkah*, Bandung: Al Maarif

- Black, Jamez A. dan Champion, Dean J. 2009. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: PT Rafika Aditama
- Departemen Agama RI. 2015. *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro
- Djamil, Fathurrahman. 2013. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika
- Ghazaly, Abdul Rahman. Ihsan, Ghufron dan Saipudin Shidiq. 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Harun, Nasrun. 2000, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hasan, M.Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Huda, Nuur. 2008, *Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE) Vol. 3: no. 6 (2017)
- Karim, Helmi. 1997, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kasiram, Moh..2010. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: UIN MALIKI Press
- Nurhanik, Siti. 2008. *Sistem Pengupahan Buruh Tani Di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Hukum Islam*”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Maolani, Rukaesih A., Ucu Cahyana. 2015. *Metodologi Penelitian Pendidikan* Jakarta: Rajawali Pers
- Marzuki, Peter Mahmud. 1984. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mas’ud, Ibndan Zainal Abidin. 2007. *Fiqh Madzhab Syafi’I*, Bandung: Pustaka Setia
- Mirawati. 2015. *Analisis Buruh Tani Padi Di Desa Pulau Bayur Kecamatan Centini Kabupaten Singingi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau

- Munawarah, Rifatul. 2009. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pengupahan Karyawan Di Perusahaan Umum Damri Semarang*. Semarang: IAIN Walisongo
- Nawawi, Ismail. 2009, *Fiqh Muamalah*, Surabaya: Vira Jaya Multi Press
- Pasaribu, Chairumandan Suhrawandi K. Lubis. 1994, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Qutub, Sayyid. 1994. *Keadilan Sosial Dalam Islam*, alih Bahasa Afif Muhamad, cet. Ke-2, Bandung: Pustaka Pelajar
- Ridwan, Murtadho. (2003). Standar Upah Kerja Menurut Sistem Ekonomi Islam. *Journal Equilibrium*, Vol.1, No. 2, hlm. 241
- Riyono, Yatim. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kantitatif*. Surabaya: UNESA University Press
- Sabiq, As-Sayyid. 1933. *Fiqh as-Sunnah*. cet. Ke-IV. Beirut: Dar al-Fiqri
- Sabiq, Sayyid. 1987, *Fiqh Sunnah 13*, penerjemah: Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al Maarif
- Ruky, Achmad S. 2002. *Manajemen Perjanjian dan Pengupahan Oleh Karyawan Perusahaan*, cet. Ke-2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Salim, M. Arskal. 1999, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Logos
- Santoso, Bayu Aji. 2013. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penggajian Di G'bol Coffee Cafe Yogyakarta*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Sarwono, Jhonatan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Shihab, M. Quraish. 2000, *Tafsir Al Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati
- Shodik, Ahmad Nur. 2008, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Di Desa Rejosari Kota Banjar Kabupaten Jawa Barat*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Singarimbun, Masri.Sofian, Efendi.1984. *Metode Penelitian Survei Edisi Revisi*, Jakarta: LP3ES

- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Sudjono, Eggy. 2009. *Bayarlah Upahnya Sebelum Kering Keringatnya*, Jakarta: PPMI
- Suhendi, Hendi. 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Syafe'I, Rachmat. 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Syafe'I, Rachmat. 2004, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia
- Syukur, Ahmad. "Standar Pengupahan Islam" 09 Januari 2018.
https://issuu.com/jurnaluniversum/docs/rev-universum-vol-9-no-1-januari2015_00/
- Wahab, Azar Bin Abdul (2017). *Perspektif Al-Sunah Terhadap Pemberian Gajidan Imbuhan Kepada Guru dan Penceramah Agama: Suatu Harian Deskriptif*. Journal Of Global Bussines and Social Enterpreneurship (GBSE), Vol. 3, No. 6, hlm. 108-132
- Wijayanti, Asri. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Repormasi*. Jakarta :Sinar Grafika
- Ya'qubHamzah. 1984, *Kode Etika Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro
- Yahya, Mukhtardan Fatchur Rahman. 1986, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al Maarif
- Zuhaili, Wahbah. 1989, *Al-Fiqh Al-Islamy WaAdillatuhu*, juz 4, Damaskus: Dar Al Fikr

Lain-lain:

- Data Statistik Kecamatan Plantungan DalamAngka 2016
- Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 bab 1 ketentuan pasal 1 (30)
- Wawancara dengan Bapak Samsi (*wargadesa Bendosari*), 13 April 2017
- Wawancara dengan Bapak Supandi (*warga desa Mojoagung*) 13 April 2017
- Wawancara dengan Bapak Sariyan (*wargadesaBendosari*) 13 April 2017
- Wawancara dengan Bapak Sugi (*wargadesa Karanganyar*) 15 April 2017

Wawancara dengan Bapak Sugianto, Penjual dan atau Pembeli Sapi (*Blantik Sapi*)

15 April 2017

Wawancara dengan Bapak Cipto Hadi Tokoh Masyarakat Desa Bendosari dan selaku pemilik sapi, 16 Mei 2017

Wawancara dengan Bapak Wahyono Tokoh Masyarakat Desa Jurangagung, 17 Mei 20017

Wawancara dengan Bapak Tohirin (*Warga Desa Tirtomulyo*) 20 Mei 2017

Wawancara dengan Bapak Haryadi (*Warga Desa Karanganyar*) 25 Mei 2017

Wawancara dengan Ibu Siti Samsiyah (*Warga Desa Jurangagung*) 03 Juni2017

Wawancara dengan Bapak Yono, Bapak Casman (*Warga Desa Tlogopayung*) 14 Juni 2017

Wawancara dengan Ibu Anik (*Dokter Hewan*) 10 Oktober 2017

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Wahyu Nely Gayatri

Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 04 Maret 1995

Alamat Rumah :Pugeran Rt. 01 Rw. 01 Desa Bendosari Plantungan
Kab. Kendal

Telepon/HP : 082324412808

Riwayat Pendidikan

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. SDN 02 Bendosari | Tahun Lulus 2006 |
| 2. MTs Nurssalam Tersono Batang | Tahun Lulus 2019 |
| 3. SMK N 5 Kendal | Tahun Lulus 2012 |

Semarang,08 Januari 2018

Wahyu Nely Gayatri